



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN KINERJA 2025

**DISUSUN OLEH :**

BALAI LITBANG  
AGAMA MAKASSAR



[bla\\_makassar](#)



[BLAM News Official](#)



[Balai Litbang Agama Makassar](#)



[blamakassar.web.id](#)

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas ridhanya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi selama Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh dengan dinamika dan tantangan, di mana Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dukungan administrasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berbagai inovasi dan langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Laporan ini memuat capaian kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar yang meliputi aspek-aspek pengelolaan keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, serta dukungan teknis administratif lainnya. Selain itu, laporan ini juga menguraikan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama, termasuk dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola, dan pengembangan sumber daya manusia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, unit kerja di lingkungan Kementerian Agama, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar di masa mendatang.

Makassar, 12 Januari 2026

Kepala Balai,



H. Saprillah

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	2
D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	3
E. Permasalahan Utama .....	10
F. Sistematika Pelaporan .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar .....	13
B. Perjanjian Kinerja .....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	27
B. Capaian Kinerja Anggaran .....	81
C. Capaian Kinerja Lainnya .....	101
BAB IV PENUTUP	
A. Analisis Capaian Sasaran Kinerja .....	106
B. Rekomendasi Perbaikan Program dan Kegiatan .....	108
LAMPIRAN	

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama, khususnya dalam penguatan moderasi beragama, pengembangan kebijakan pembangunan bidang agama, serta penguatan tata kelola organisasi. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan melalui sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang mencerminkan kontribusi organisasi terhadap pembangunan bidang agama dan penguatan moderasi beragama.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 mencapai 111% dengan kategori Sangat Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi ditopang oleh penyusunan naskah pengkajian kebijakan pembangunan bidang agama, fasilitasi penguatan moderasi beragama pada berbagai kelompok sasaran, serta peningkatan kualitas dukungan manajemen organisasi.

Apabila dibandingkan secara total, capaian kinerja Tahun 2025 mengalami penurunan nilai dibandingkan Tahun 2024, yaitu dari 120% pada Tahun 2024 menjadi 111% pada Tahun 2025. Namun demikian, kedua tahun tersebut tetap berada pada kategori Sangat Baik. Perubahan nilai capaian ini tidak mencerminkan penurunan kualitas kinerja organisasi, melainkan dipengaruhi oleh penyesuaian indikator kinerja, perubahan struktur program, serta penajaman target kinerja setelah revisi Perjanjian Kinerja dan kebijakan efisiensi anggaran. Dengan indikator yang semakin spesifik dan target yang lebih realistis, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang lebih terukur dan akuntabel.

Penurunan nilai capaian juga terjadi dalam konteks pengelolaan anggaran yang mengalami pemblokiran dan penyesuaian pagu. Meskipun

ruang fiskal lebih terbatas, organisasi tetap mampu mempertahankan kategori kinerja sangat baik melalui optimalisasi sumber daya dan prioritas program. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan kualitas pengelolaan kinerja yang lebih matang, karena kinerja tidak hanya ditopang oleh tingginya capaian angka, tetapi oleh kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Apabila dibandingkan secara total, capaian kinerja Tahun 2025 mengalami penurunan nilai dibandingkan Tahun 2024, yaitu dari 120% pada Tahun 2024 menjadi 111% pada Tahun 2025. Namun demikian, kedua tahun tersebut tetap berada pada kategori Sangat Baik. Perubahan nilai capaian ini tidak mencerminkan penurunan kualitas kinerja organisasi, melainkan dipengaruhi oleh penyesuaian indikator kinerja, perubahan struktur program, serta penajaman target kinerja setelah revisi Perjanjian Kinerja dan kebijakan efisiensi anggaran. Dengan indikator yang semakin spesifik dan target yang lebih realistis, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang lebih terukur dan akuntabel.

Penurunan nilai capaian juga terjadi dalam konteks pengelolaan anggaran yang mengalami pemblokiran dan penyesuaian pagu. Meskipun ruang fiskal lebih terbatas, organisasi tetap mampu mempertahankan kategori kinerja sangat baik melalui optimalisasi sumber daya dan prioritas program. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan kualitas pengelolaan kinerja yang lebih matang, karena kinerja tidak hanya ditopang oleh tingginya capaian angka, tetapi oleh kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Secara metodologis, kondisi tersebut menunjukkan terjadinya perbaikan kualitas pengukuran kinerja, di mana capaian kinerja lebih mencerminkan kinerja riil organisasi (actual performance) dibandingkan capaian administratif semata. Penajaman indikator berbasis outcome dan penyesuaian target kinerja menjadikan nilai capaian lebih kredibel, sehingga hasil pengukuran kinerja dapat digunakan secara lebih tepat sebagai dasar pengambilan keputusan, evaluasi program, dan perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

Disamping itu juga, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar melaksanakan capaian kinerja lainnya yang berhasil memperoleh apresiasi dan penghargaan dari instansi lain, diantaranya :

- a. Akreditasi Perpustakaan dengan Predikat B oleh Perpustakaan Nasional;

- b. Peringkat Pertama pada Kategori Penyelesaian Rekonsiliasi Keuangan Tercepat lingkup wilayah kerja KPPN Makassar II periode Semester I Tahun 2025 oleh KPPN Makassar II.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi, setiap unit kerja pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang salah satu komponennya akuntabilitas. Guna mewujudkan akuntabilitas dimaksud, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga harus melaporkan kinerjanya.

Laporan kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah unit eselon III di lingkungan Kementerian Agama RI yang mempunyai tugas membantu Menteri Agama dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama pada tingkat provinsi/kabupaten/kota. Dalam rangka pelaksanaan tugas, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar telah menyusun indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pelaporan dan analisis atas capaian kinerja dilakukan secara komprehensif, yang akan disajikan pada bagian akhir laporan sebagai upaya ke depan yang akan ditempuh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar untuk meningkatkan dan mengakselerasi capaian kinerja di masa mendatang.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi

serta pengelolaan anggaran untuk mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan selama tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan laporan ini untuk menggambarkan hasil evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dan dukungan terhadap sasaran program selama tahun 2025, yang selanjutnya dijadikan bahan masukkan dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

### **C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Litbang Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur, khazanah keagamaan, dan manajemen organisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur, khazanah keagamaan, dan manajemen organisasi;
3. Pelayanan kepada masyarakat di bidang data dan hasil penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kemitraan dengan satuan organisasi/satuan kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Balai Litbang Agama; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Balai Litbang Agama.

### **D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

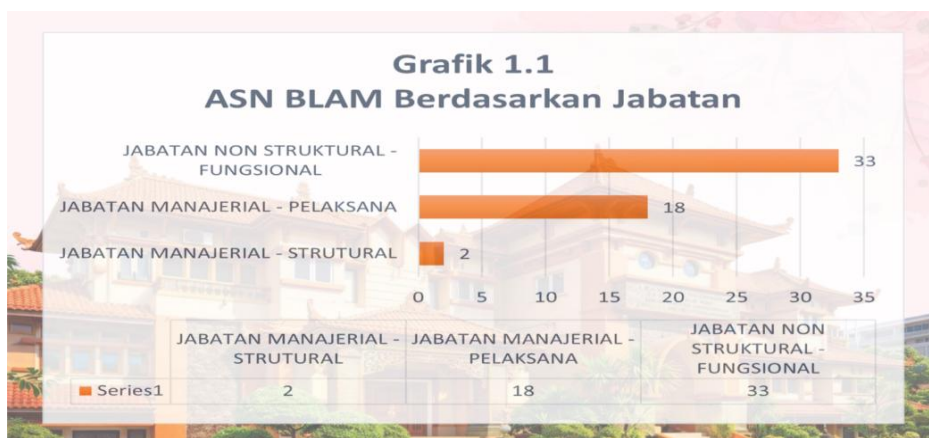
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Litbang Agama, Susunan Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar yakni:



**Gambar 1.1.** Struktur Organisasi Balai Litbang Agama Makassar

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari kelompok jabatan struktural meliputi Kepala Balai dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Selain itu, terdapat kelompok Jabatan Fungsional yang mencakup jabatan fungsional keahlian serta jabatan fungsional keterampilan di bawah koordinasi kelompok jabatan struktural. Struktur organisasi ini juga didukung oleh unsur pelaksana yang menjalankan tugas operasional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Susunan organisasi ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai secara efektif dan akuntabel.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar didukung pegawai sebanyak 53 orang ASN yang terdiri dari:

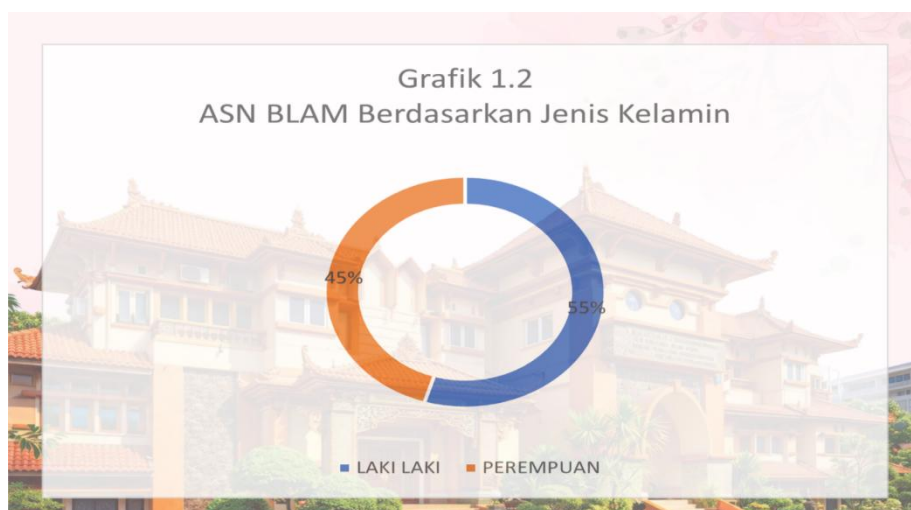


**Gambar 1.2.** Grafik ASN BLAM Berdasarkan Jabatan

Gambar 1.2 menunjukkan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berdasarkan jenis jabatan. Berdasarkan grafik tersebut, jabatan nonstruktural-fungsional mendominasi dengan jumlah 33 orang, yang mencerminkan bahwa struktur kepegawaian BLAM lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas teknis dan keahlian substantif sesuai dengan karakteristik fungsi penelitian dan pengembangan.

Selanjutnya, jabatan manajerial-pelaksana tercatat sebanyak 18 orang, yang berperan sebagai pendukung operasional dan administrasi organisasi. Sementara itu, jabatan manajerial-struktural hanya berjumlah 2 orang, menunjukkan struktur organisasi yang relatif ramping pada level struktural.

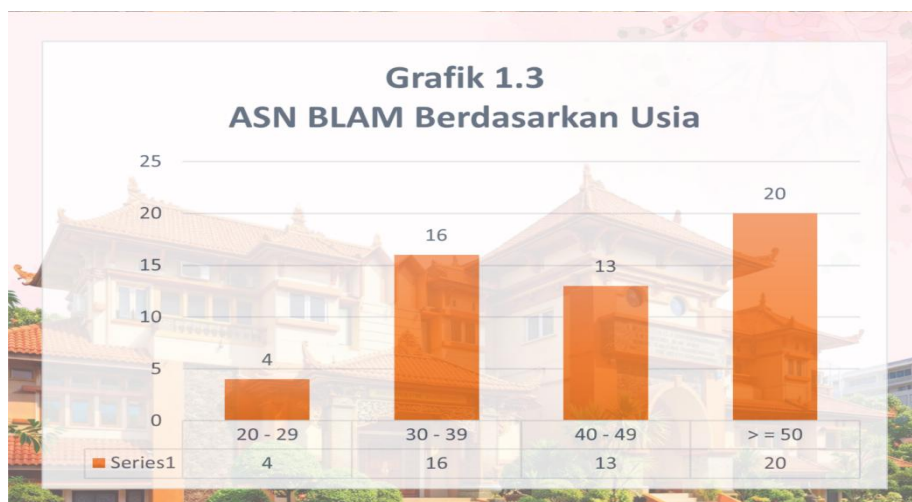
Komposisi tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan organisasi BLAM didukung oleh proporsi SDM fungsional yang lebih besar dibandingkan struktural, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan lebih bertumpu pada kapasitas profesional dan teknis ASN. Kondisi ini selaras dengan kebutuhan organisasi yang menekankan output berbasis kajian, kebijakan, dan layanan substantif.



**Gambar 1.3.** Grafik ASN BLAM Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 1.3 menunjukkan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan grafik tersebut, ASN laki-laki berjumlah 55 persen, sedangkan ASN perempuan sebesar 45 persen. Komposisi ini menunjukkan adanya proporsi yang relatif seimbang antara ASN laki-laki dan perempuan di lingkungan BLAM.

Keseimbangan komposisi gender tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di BLAM telah memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan memberikan ruang partisipasi yang setara bagi ASN laki-laki maupun perempuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kondisi ini mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan berkontribusi positif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.



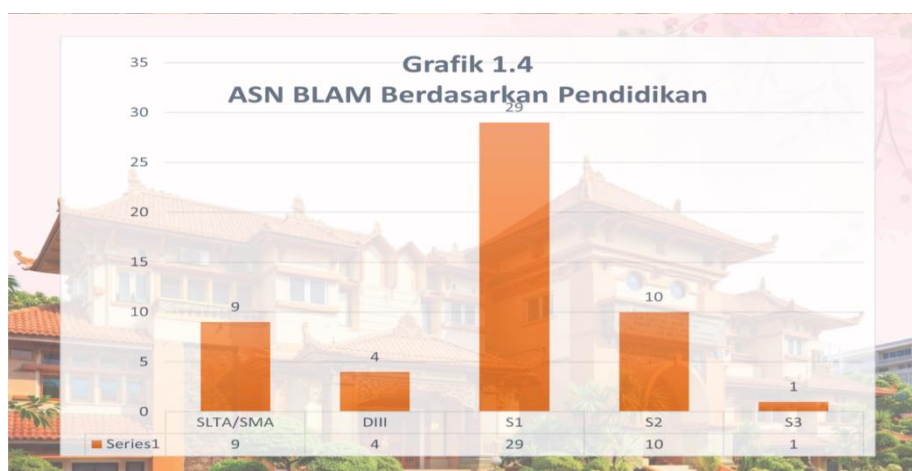
**Gambar 1.4.** Grafik ASN BLAM Berdasarkan Usia

Gambar 1.4 menunjukkan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berdasarkan kelompok usia. Berdasarkan grafik tersebut, kelompok usia  $\geq 50$  tahun merupakan kelompok terbesar, dengan jumlah 20 orang, yang mencerminkan dominasi ASN senior dengan pengalaman kerja dan pengetahuan kelembagaan yang kuat.

Kelompok usia 30–39 tahun berjumlah 16 orang, diikuti oleh kelompok usia 40–49 tahun sebanyak 13 orang. Sementara itu, kelompok usia 20–29 tahun merupakan kelompok paling sedikit, dengan jumlah 4 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur usia ASN BLAM didominasi oleh usia produktif menengah hingga senior, dengan proporsi ASN muda yang relatif terbatas.

Distribusi usia tersebut mengindikasikan bahwa BLAM memiliki modal pengalaman dan stabilitas organisasi yang baik, namun sekaligus memerlukan perencanaan regenerasi SDM secara berkelanjutan. Penguatan rekrutmen ASN muda, transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), serta pengembangan kompetensi lintas generasi menjadi penting

untuk menjaga kesinambungan kinerja organisasi ke depan.

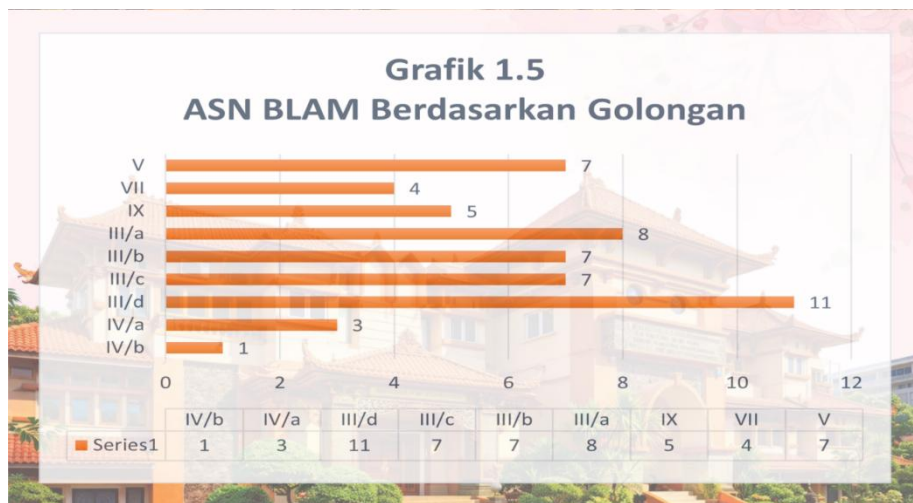


**Gambar 1.5.** Grafik ASN BLAM Berdasarkan Pendidikan

Gambar 1.5 menunjukkan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Berdasarkan grafik tersebut, pendidikan S1 mendominasi dengan jumlah 29 orang, yang menunjukkan bahwa mayoritas ASN memiliki kualifikasi pendidikan sarjana sebagai modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Selanjutnya, ASN dengan pendidikan S2 berjumlah 10 orang, mencerminkan ketersediaan sumber daya manusia dengan kompetensi lanjutan yang mendukung penguatan kapasitas analisis, perumusan kebijakan, dan pengembangan program. ASN dengan pendidikan SLTA/SMA tercatat sebanyak 9 orang, sementara pendidikan DIII berjumlah 4 orang. Adapun ASN dengan pendidikan S3 berjumlah 1 orang, yang berperan strategis dalam penguatan keilmuan dan kualitas kajian.

Komposisi pendidikan tersebut menunjukkan bahwa BLAM memiliki basis SDM yang cukup kuat pada level pendidikan sarjana dan pascasarjana, namun masih terbuka ruang untuk peningkatan kualifikasi pendidikan melalui pengembangan kompetensi dan pendidikan lanjutan. Penguatan SDM berpendidikan tinggi menjadi penting untuk mendukung peningkatan kualitas output penelitian, kebijakan, dan layanan substantif organisasi.



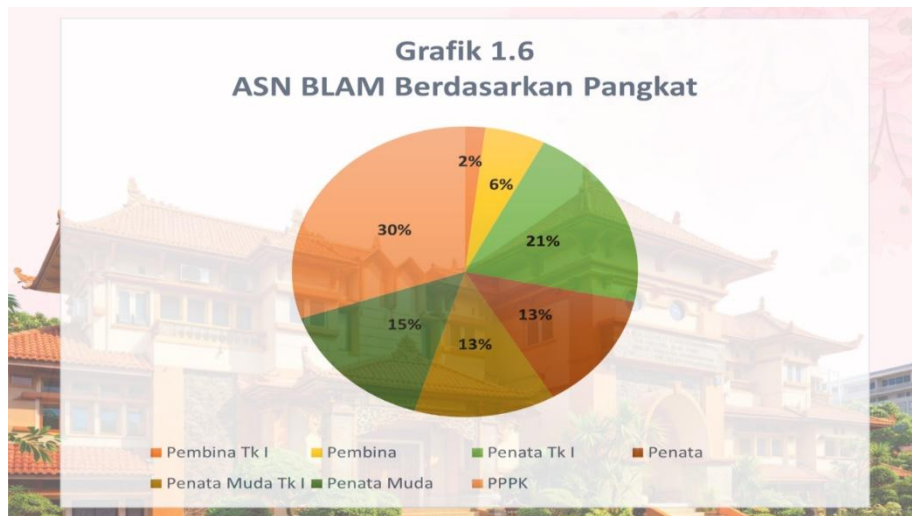
**Gambar 1.6.** Grafik ASN BLAM Berdasarkan Golongan

Gambar 1.6 menunjukkan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berdasarkan golongan kepangkatan. Berdasarkan grafik tersebut, ASN paling banyak berada pada golongan III, khususnya golongan III/d dengan jumlah 11 orang, diikuti oleh golongan III/a sebanyak 8 orang serta golongan III/b dan III/c masing-masing sebanyak 7 orang. Dominasi golongan III ini menunjukkan bahwa struktur kepangkatan ASN BLAM didominasi oleh ASN pada jenjang menengah, yang umumnya berada pada fase produktif dan aktif dalam pelaksanaan tugas teknis maupun manajerial.

ASN pada golongan V tercatat sebanyak 7 orang, sedangkan golongan IX dan VII masing-masing berjumlah 5 orang dan 4 orang. Keberadaan ASN pada golongan tersebut mencerminkan variasi jenjang kepangkatan yang mendukung kebutuhan organisasi baik pada aspek fungsional maupun manajerial.

Sementara itu, jumlah ASN pada golongan IV relatif terbatas, dengan golongan IV/a sebanyak 3 orang dan golongan IV/b sebanyak 1 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah ASN pada jenjang kepangkatan tinggi masih terbatas, sehingga diperlukan perencanaan pengembangan karier dan pembinaan kepangkatan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, distribusi golongan ASN BLAM mencerminkan struktur kepangkatan yang didominasi oleh ASN golongan menengah, yang menjadi tulang punggung pelaksanaan program dan kegiatan. Ke depan, penguatan pembinaan karier dan percepatan kenaikan pangkat yang berbasis kinerja dan kompetensi menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan struktur kepangkatan organisasi.



**Gambar 1.7.** Grafik ASN BLAM Berdasarkan Pangkat

Gambar 1.7 menunjukkan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berdasarkan pangkat. Berdasarkan grafik tersebut, pangkat Penata Muda (II/a) merupakan proporsi terbesar, yaitu 30 persen, yang mencerminkan dominasi ASN pada jenjang awal-menengah dalam struktur kepangkatan.

Selanjutnya, pangkat Penata Tk. I (III/d) tercatat sebesar 21 persen, diikuti oleh pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) sebesar 15 persen, serta pangkat Penata (III/c) dan Pembina (IV/a) yang masing-masing sebesar 13 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN BLAM berada pada jenjang pangkat menengah, yang menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas teknis dan operasional organisasi.

Sementara itu, pangkat Pembina Tk. I (IV/b) memiliki proporsi paling kecil, yaitu 2 persen, dan pangkat Pembina (IV/a) sebesar 6 persen, yang menunjukkan bahwa jumlah ASN pada pangkat tinggi relatif terbatas. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perencanaan pengembangan karier dan pembinaan kepangkatan secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan struktur pangkat dan keberlanjutan kepemimpinan organisasi.

Secara keseluruhan, distribusi pangkat ASN BLAM mencerminkan struktur kepangkatan yang didominasi oleh jenjang menengah, yang mendukung stabilitas organisasi sekaligus membuka ruang bagi penguatan regenerasi dan peningkatan kompetensi ASN ke depan.

## E. Permasalahan Utama

Dalam melaksanakan aspek strategis, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai salah satu unit kerja pada Kementerian Agama mengalami beberapa kendala atau permasalahan untuk mengakselerasi kegiatan dalam upaya pencapaian program dan kegiatan prioritas baik yang bersifat nasional maupun bersifat internal.

No	Permasalahan Utama	Kendala	Tindak Lanjut
1	<p><b>Ketidakpastian Regulasi dan Status Kelembagaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidakpastian “payung kelembagaan” UPT;</li> <li>• Ketidakpastian tuisi (tugas &amp; fungsi) operasional;</li> <li>• Ketidakpastian SOTK turunan (detail perangkat organisasi UPT).</li> </ul>	<p><b>Dampak Langsung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepastian rantai koordinasi melemah;</li> <li>• Risiko ketidakselarasan perencanaan-penganggaran;</li> <li>• Kebingungan tata kelola SDM;</li> <li>• Risiko audit dan kinerja.</li> </ul>	<p><b>Arah Solusi yang aman secara tata kelola tanpa menunggu semuanya sempurna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tegaskan “positioning sementara” (interim) berbasis regulasi tertinggi;</li> <li>• Buat “matriks kesesuaian” (bridging) dokumen lama → dokumen baru;</li> <li>• Narasikan sebagai “risiko transisi” yang dimitigasi;</li> <li>• Penajaman tuisi operasional: dari ‘litbang murni’ ke ‘litbang untuk kebijakan’</li> </ul>
2	<p><b>Kekurangan SDM Substantif dan Kesenjangan Kompetensi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transisi kelembagaan dan ketidakpastian tuisi;</li> <li>• Keterbatasan kebijakan pemenuhan SDM substantif;</li> <li>• Belum optimalnya manajemen talenta dan pembinaan JF;</li> <li>• Beban kerja tinggi dengan dukungan SDM terbatas.</li> </ul>	<p><b>Berimplikasi langsung terhadap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas dan kedalaman output rekomendasi kebijakan;</li> <li>• Kecepatan dan ketepatan penyusunan rekomendasi kebijakan;</li> <li>• Risiko penurunan kinerja jangka menengah;</li> <li>• Kerentanan</li> </ul>	<p><b>Arah penanganan dan Strategi mitigasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penajaman Kebutuhan SDM Substantif;</li> <li>• Penguatan Kompetensi Berbasis Gap;</li> <li>• Skema Penguatan Non-Struktural;</li> <li>• Narasi Kinerja Berbasis Transisi.</li> </ul>

		terhadap penilaian kinerja dan akuntabilitas.	
<b>3</b>	<b>Keterbatasan dan Ketidakstabilan Anggaran</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan kelembagaan dan perubahan mandat organisasi;</li> <li>• Kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran nasional;</li> <li>• Belum optimalnya integrasi perencanaan-penganggaran;</li> <li>• Ketergantungan pada satu sumber pendanaan utama.</li> </ul>	<b>Dampak terhadap Kinerja Organisasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala dan kualitas output kebijakan;</li> <li>• Efektivitas penyerapan anggaran;</li> <li>• Konsistensi capaian kinerja;</li> <li>• Peningkatan beban manajerial.</li> </ul>	<b>Strategi Penanganan dan Mitigasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penajaman Prioritas Berbasis Dampak;</li> <li>• Penguatan Integrasi Perencanaan dan Anggaran;</li> <li>• Optimalisasi Efisiensi dan Sinergi;</li> <li>• Narasi Kinerja Berbasis Risiko Transisi.</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Ketidaksinkronan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidaksesuaian Indikator Kinerja dan Output Anggaran;</li> <li>• Perbedaan Waktu Penetapan Dokumen;</li> <li>• Penyesuaian Anggaran dalam Tahun Berjalan.</li> </ul>	<b>Berimplikasi pada:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya keterbacaan hubungan antara anggaran dan kinerja;</li> <li>• Potensi deviasi dalam penilaian kinerja;</li> <li>• Beban administratif tambahan;</li> <li>• Risiko persepsi ketidakefektifan tata kelola.</li> </ul>	<b>Strategi Penanganan dan Mitigasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonisasi Dokumen Secara Bertahap;</li> <li>• Penajaman Indikator yang Adaptif;</li> <li>• Penguatan Narasi Kinerja;</li> <li>• Integrasi Perencanaan-Penganggaran Berbasis Siklus.</li> </ul>

## F. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

### BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

(*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang berjalan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Bagian 1, Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Triwulan IV Tahun 2025 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut;
- b) Bagian 2, Capaian Kinerja Lainnya, yang menguraikan tentang capaian kinerja monumental yang tidak terdapat dalam perjanjian kinerja dan menjadi indikator keberhasilan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar; dan
- c) Bagian 3, Capaian Anggaran, yang menguraikan tentang anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Triwulan IV Tahun 2025.

## **BAB IV PENUTUP**

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar selama Tahun 2025 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun selanjutnya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar**

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan tata kelola Kementerian Agama. Dalam konteks tersebut, seluruh tujuan dan sasaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar harus sejalan dengan visi besar Kementerian Agama dan selaras dengan visi dan misi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) sebagai unit eselon I pembina. Dengan demikian, casecading visi misi dari tingkat kementerian hingga unit pelaksana teknis menjadi penting untuk memastikan konsistensi arah pembangunan, sinergi program, serta efektifitas pencapaian kinerja.

Visi pembangunan Kementerian Agama pada periode 2025–2029 dirumuskan dengan merujuk pada visi kepemimpinan nasional, yakni “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, yang dalam dokumen Renstra BMBPSDM dimaknai sebagai ikhtiar kolektif untuk membangun masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas. Makna “masyarakat rukun, maslahat, dan cerdas” bukan sekadar gambaran normatif, tetapi menjadi arah strategis pembangunan agama yang ditekankan oleh pemerintah sebagai pondasi untuk mewujudkan Indonesia yang berkepribadian, berdaya saing, dan memiliki ketahanan sosial yang kuat dalam jangka panjang.

Berdasarkan substansi tersebut, visi pembangunan Kementerian Agama untuk periode perencanaan ini dapat dirumuskan sebagai “Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas melalui penyelenggaraan kehidupan beragama, pendidikan agama, dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.”

Untuk mewujudkan visi Kementerian Agama tentang masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas, dokumen Draf Renstra BMBPSDM 2025–2029 menetapkan tiga misi utama yang berfungsi sebagai arah kebijakan pembangunan bidang agama pada periode 2025–2029. Ketiga misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan

masalahat;

2. Meningkatkan kualitas pendidikan umum berciri agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Ketiga misi inilah yang menjadi pondasi bagi penyusunan arah kebijakan BMBPSDM dan seluruh satuan kerja di bawahnya, termasuk Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Berikut penjabaran naratif secara mendalam.

Tujuan merupakan pernyataan strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh BMBPSDM sebagai Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Agama selama periode 2025–2029. Tujuan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan tidak hanya selaras dengan visi dan misi Kementerian Agama, tetapi juga relevan dengan perubahan lingkungan strategis, tantangan kelembagaan, serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kehidupan beragama yang semakin kompleks.

Tujuan strategis:

1. Perwujudan Kerukunan Umat Beragama dan Cinta Kemanusiaan melalui Peningkatan Kualitas Pemahaman Agama yang Moderat;
2. Peningkatan Kualitas Umat Beragama melalui Pelayanan Keagamaan, Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Ekoteologi;
3. Peningkatan Mutu dan Lulusan Lembaga Pendidikan dan Pesantren yang Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing;
4. Peningkatan Kualitas Birokrasi Pemerintahan melalui Budaya yang Bersih dan Melayani Berbasis Digital.

Sasaran program ini berfungsi sebagai jembatan antara tujuan strategis jangka panjang dan sasaran kegiatan operasional di level unit kerja. Dengan kata lain, sasaran program memastikan bahwa seluruh aktivitas dan intervensi yang dilakukan BMBPSDM, mulai dari penyusunan kebijakan, penyelenggaraan pelatihan, layanan keagamaan, hingga penguatan tata kelola, betul-betul menghasilkan perubahan signifikan yang dapat diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran program, sasaran kegiatan :

1. Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan masalahat dalam

- mewujudkan kehidupan beragama yang rukun;
2. Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif;
  3. Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran;
  4. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.

<b>Tabel 2.1 Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK)</b>		
<b>Kode</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>
<b>SP1</b>	Meningkatnya Pemahaman dan Praktik Keagamaan Maslahat dalam Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Rukun	Meningkatnya Kualitas Penguatan Moderasi Beragama dan Kebijakan Pembangunan Bidang Agama
<b>SP3</b>	Meningkatnya Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan
<b>SP4</b>	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 disusun dengan menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang mengacu pada dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta berpedoman pada amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut dimaksudkan sebagai instrumen akuntabilitas sekaligus sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar selama Tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya, Perjanjian Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 mengalami satu kali penyempurnaan dokumen. Perjanjian Kinerja awal yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2025 menetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Seiring dengan dinamika kebijakan dan penyesuaian arsitektur kinerja di tingkat kementerian, dilakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja pada tanggal 30 September 2025, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Penelitian dan

Pengembangan Agama Makassar dan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Penyesuaian Perjanjian Kinerja tersebut merupakan tindak lanjut atas perubahan arsitektur Rencana Strategis Kementerian Agama, yang berdampak langsung pada penataan kembali arsitektur kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Agama, termasuk Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Perubahan arsitektur ini mengharuskan dilakukannya penyesuaian sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja agar tetap konsisten dengan tujuan strategis, arah kebijakan, serta kerangka kinerja Kementerian Agama yang telah diperbarui.

Sebagai konsekuensi dari penyesuaian tersebut, struktur Perjanjian Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar disederhanakan dan dipertegas fokusnya. Perjanjian Kinerja hasil penyempurnaan menetapkan 3 (tiga) sasaran kinerja dengan 16 (enam belas) indikator kinerja. Penyederhanaan sasaran ini dilakukan untuk meningkatkan keterfokusan kinerja, memperkuat keterkaitan antara sasaran strategis dan indikator kinerja, serta meningkatkan keterbacaan hubungan antara kinerja dan dukungan sumber daya yang tersedia.

Dengan demikian, penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tidak dimaksudkan sebagai perubahan arah kinerja, melainkan sebagai upaya harmonisasi dan penajaman kinerja agar pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tetap selaras dengan kebijakan strategis Kementerian Agama. Perjanjian Kinerja hasil revisi selanjutnya menjadi acuan utama dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar selama Tahun 2025, serta menjadi dasar penyusunan laporan kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
	Meningkatnya	Indeks Profesionalitas ASN	77,10

1	kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	51,00
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspiratif	3,00
		Nilai kepuasan layanan kepegawaian	76,70
2	Meningkatnya tata kualitas perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94,25
		Persentase satuan kerja yang menyusun Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	100,00
		Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu	75,00
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	60,00
4	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	100,00
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	91,00
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan, tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	15,00
		Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online	15,00
		Nilai Akreditasi Perpustakaan	B
6	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen	100,00
		Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	100,00
7	Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan agama dan penguatan moderasi beragama	Persentase Naskah kebijakan Pembangunan Agama yang dimanfaatkan	91,00

		Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76,00
		Nilai Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama	76,00
8	Meningkatnya kualitas dan kebermanfaatan naskah kebijakan, Layanan Lektur dan Literasi Keagamaan	Persentase naskah kebijakan Lektur dan Literasi Keagamaan yang dimanfaatkan	91,00

Perubahan alokasi dan struktur anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sepanjang Tahun 2025 memberikan implikasi langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Pada tahap awal, keberadaan pagu anggaran yang diblokir sebagai bagian dari kebijakan efisiensi nasional menyebabkan ruang gerak pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas, khususnya pada kegiatan substantif yang membutuhkan dukungan pendanaan sejak awal tahun anggaran. Kondisi tersebut mengharuskan unit kerja melakukan penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan dengan memprioritaskan aktivitas yang bersifat esensial dan mendukung pencapaian sasaran kinerja utama.

Selanjutnya, perubahan arsitektur anggaran pada pertengahan tahun sebagai tindak lanjut kebijakan penggunaan program baru di lingkungan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) berdampak pada penataan ulang struktur program dan kegiatan. Perubahan dari satu program menjadi tiga program tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menuntut penyesuaian perencanaan operasional, penajaman output, serta realokasi sumber daya agar tetap selaras dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada fase ini, sebagian upaya manajerial terserap pada proses harmonisasi dan penyesuaian dokumen, sehingga pelaksanaan kegiatan substantif baru dapat berjalan optimal setelah struktur anggaran relatif stabil.

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	Meningkatnya Kualitas Penguatan Moderasi Beragama dan Kebijakan Pembangunan Bidang Agama	Persentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan	91
		Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76
<b>2</b>	Meningkatnya kualitas penguatan Moderasi Beragama dan Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Persentase Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan	91
		Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76
<b>3</b>	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM	Nilai Kinerja Anggaran	90
		Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja sesuai standar	75
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,25
		Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	80,95
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu	100
		Indeks Profesionalisme ASN	77,10
		Persentase Satuan Kerja yang memiliki Rencana Kebutuhan Pegawai dan Rencana Pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	100
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspirasi	3
		Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	15
		Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	5
		Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online	15

		Nilai Akreditasi Perpustakaan	C
--	--	-------------------------------	---

Seiring dengan dilakukannya revisi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025, terjadi penyesuaian terhadap jumlah dan struktur indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi. Pada Triwulan I dan Triwulan II, Perjanjian Kinerja awal memuat 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Setelah diberlakukannya Perjanjian Kinerja hasil revisi pada Triwulan III dan Triwulan IV, jumlah indikator kinerja mengalami penyesuaian menjadi 16 (enam belas) indikator.

Pengurangan jumlah indikator tersebut tidak disebabkan oleh penghapusan indikator tanpa penilaian, melainkan merupakan konsekuensi dari konsolidasi dan penajaman indikator agar lebih selaras dengan kewenangan unit kerja, struktur program hasil revisi, serta prinsip pengukuran kinerja pada tingkat Eselon III yang berorientasi pada output.

Adapun tiga indikator kinerja yang tidak lagi muncul sebagai indikator tersendiri dalam Perjanjian Kinerja hasil revisi adalah sebagai berikut:

1. Nilai Kepuasan Layanan Kepegawaian
2. Nilai Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Ketiga indikator tersebut telah tercantum dan digunakan dalam Perjanjian Kinerja awal serta telah dinilai pada periode sebelum revisi. Dalam Perjanjian Kinerja hasil revisi, indikator-indikator tersebut tidak lagi dipertahankan sebagai indikator mandiri karena secara substansi memiliki keterkaitan langsung dan tumpang tindih dengan indikator kinerja lain yang lebih representatif terhadap hasil (output) yang berada dalam kendali langsung unit kerja.

Secara substansial, Nilai Kepuasan Layanan Kepegawaian dikonsolidasikan ke dalam indikator yang mengukur profesionalisme dan pengelolaan SDM aparatur, sehingga pengukuran kinerja difokuskan pada output yang lebih terukur dan berada dalam kewenangan unit kerja. Nilai Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama disederhanakan dan direpresentasikan melalui indikator yang mengukur tingkat moderasi beragama pada kelompok sasaran yang difasilitasi, sehingga fokus pengukuran bergeser dari evaluasi program secara umum ke hasil

fasilitasi yang lebih konkret. Sementara itu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dikonsolidasikan ke dalam indikator kinerja anggaran yang bersifat komprehensif, guna menghindari duplikasi pengukuran pada aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Dengan demikian, penyesuaian jumlah indikator kinerja dari 19 menjadi 16 merupakan bagian dari upaya penyederhanaan, konsistensi, dan penguatan kualitas sistem pengukuran kinerja, bukan sebagai pengurangan akuntabilitas. Perubahan tersebut justru dimaksudkan untuk memastikan bahwa indikator kinerja yang digunakan benar-benar mencerminkan output yang relevan, terukur, dan berada dalam kendali unit kerja, sekaligus mendukung keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja setelah revisi Perjanjian Kinerja.

Pengurangan jumlah indikator kinerja dilakukan melalui mekanisme konsolidasi indikator yang memiliki keterkaitan substansi, sehingga tidak menimbulkan kehilangan maupun pengabaian atas pengukuran kinerja. Dalam konteks evaluasi kinerja Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025, perlu ditegaskan bahwa penilaian kinerja pada periode tersebut sepenuhnya mengacu pada Perjanjian Kinerja awal, mengingat Perkin revisi belum diberlakukan pada saat pelaksanaan dan evaluasi kinerja TW I dan TW II. Oleh karena itu, capaian kinerja yang diperoleh pada TW I dan TW II mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja versi awal, khususnya pada aspek tata kelola, perencanaan, penganggaran, serta dukungan manajemen.

Sebagai bentuk kesinambungan dan akuntabilitas pelaporan, evaluasi kinerja sebelum penetapan Perkin revisi disajikan dalam bentuk rerata capaian kinerja Triwulan I dan Triwulan II. Penyajian rerata ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran objektif mengenai performa organisasi sebelum dilakukan penyesuaian sasaran dan indikator kinerja. Rerata capaian TW I–TW II tersebut selanjutnya digunakan sebagai baseline pembanding terhadap evaluasi kinerja akhir tahun yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025.

Dengan demikian, perbandingan antara capaian kinerja TW I–TW II dan capaian kinerja setelah Perkin revisi tidak dimaknai sebagai penurunan atau ketidakkonsistenan kinerja, melainkan sebagai konsekuensi logis dari perubahan kerangka kinerja dan penajaman mandat organisasi. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh capaian

kinerja Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2025 tetap dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, metodologis, dan substantif, baik sebelum maupun setelah penetapan Perjanjian Kinerja Revisi.

Perubahan dan dinamika anggaran sepanjang Tahun 2025 memengaruhi tempo dan strategi pencapaian kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, namun tidak mengubah arah dan tujuan kinerja yang telah ditetapkan. Penyesuaian yang dilakukan diposisikan sebagai bagian dari manajemen risiko transisi kebijakan dan efisiensi anggaran, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan merupakan hasil optimalisasi sumber daya dalam kondisi keterbatasan. Dengan demikian, pelaksanaan dan capaian kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tetap dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya, pada akhir Tahun 2025 kembali dilakukan perubahan terhadap rincian DIPA Balai Litbang Agama Makassar, yang disebabkan oleh adanya penambahan alokasi Anggaran Belanja Pegawai serta penghapusan pagu anggaran yang sebelumnya diblokir. Perubahan tersebut berdampak pada penyesuaian total anggaran yang dapat dikelola oleh unit kerja.

Dengan demikian, berdasarkan DIPA terakhir Balai Litbang Agama Makassar tertanggal 5 Januari 2026, total alokasi anggaran yang dikelola menjadi sebesar Rp9.001.912.000,00 (sembilan miliar satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

Penyesuaian anggaran ini memberikan kepastian pendanaan yang lebih baik pada akhir tahun anggaran, namun karena dilakukan pada periode akhir, pemanfaatannya lebih diarahkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan kegiatan prioritas dan pemenuhan target kinerja utama, bukan untuk perluasan cakupan kegiatan baru. Oleh karena itu, optimalisasi anggaran difokuskan pada penyelesaian kegiatan yang telah direncanakan serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan kinerja.

Rincian alokasi anggaran awal dan perubahan sepanjang Tahun 2025 selanjutnya disajikan pada tabel berikut :

KEGIATAN	DIPA AWAL	BLOKIR	DIPA AKHIR
DC.7895 Pengembangan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama		2.588.115.000	512.980.000
WA.2153 Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan	2.962.164.000		863.543.000
WA.2154 Penelitian dan Pengembangan Lektor Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	1.180.000.000		108.664.000
WA.2156 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM	7.191.187.000	519.486.000	7.428.436.000
5311.ABH Penelitian dan Pengembangan Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	300.000.000		88.289.000
DI.7896 Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan		211.711.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>11.633.351.000</b>	<b>3.319.312.000</b>	<b>9.001.912.000</b>

Pelaksanaan anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar pada Tahun Anggaran berjalan dilaksanakan dalam kerangka kebijakan pengendalian fiskal nasional melalui penerapan efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme pemblokiran anggaran (blokir AA) serta penyesuaian alokasi belanja yang dilakukan secara selektif, terukur, dan berbasis prioritas.

Pada awal tahun, pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp11.633.351.000 sebagaimana tercantum dalam DIPA awal. Dalam perjalanannya, dilakukan pemblokiran anggaran secara bertahap hingga mencapai nilai Rp3.319.312.000, sehingga pagu anggaran efektif yang dapat dikelola menjadi Rp9.001.912.000. Struktur ini menunjukkan konsistensi antara pagu awal, nilai pemblokiran, dan pagu akhir, serta mencerminkan kepatuhan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku.

Selama tahun berjalan, pengelolaan anggaran dilaksanakan melalui serangkaian revisi DIPA yang bersifat dinamis dan adaptif. Pada tahap awal (Pagu Awal hingga Revisi ke-01), struktur anggaran relatif stabil dengan nilai blokir sebesar Rp2.134.809.000. Memasuki Revisi ke-02 hingga Revisi ke-04, nilai blokir meningkat menjadi Rp3.385.169.000 sebagai tindak lanjut awal kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Selanjutnya, pada Revisi ke-05, dilakukan penyesuaian teknis terhadap pagu dan nilai blokir, sebelum akhirnya struktur pagu kembali stabil pada revisi-revisi berikutnya.

Perubahan penting dan substantif terjadi pada Revisi ke-11, di mana dilakukan penyesuaian struktur program. Pada tahap ini, jumlah program yang sebelumnya hanya terdiri dari 1 (satu) program, yaitu Program Dukungan Manajemen, mengalami penambahan menjadi 3 (tiga) program, dengan ditambahkan:

1. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama; dan
2. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran.

Penambahan dua program tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pagu anggaran maupun perubahan nilai blokir, sehingga dapat ditegaskan bahwa perubahan pada Revisi ke-11 merupakan restrukturisasi dan penajaman klasifikasi program. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat keterkaitan antara mandat organisasi, struktur program, serta logika perencanaan dan pengukuran kinerja, bukan sebagai bentuk ekspansi fiskal.

Seiring dengan pelaksanaan kebijakan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, rasionalisasi anggaran terutama berdampak pada kegiatan yang bersifat pengembangan kebijakan dan penelitian tematik. Beberapa kegiatan mengalami pengurangan alokasi dan penyederhanaan lingkup pelaksanaan, bahkan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya akibat pemblokiran anggaran. Namun demikian, penyesuaian dilakukan secara selektif dengan tetap menjaga keberlangsungan output prioritas dan substansi kinerja.

Di sisi lain, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis justru mengalami penguatan alokasi anggaran secara bersih. Kebijakan ini ditempuh untuk menjamin keberlanjutan operasional organisasi, menjaga kualitas tata kelola kinerja dan anggaran, serta

memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan dan akuntabilitas kinerja di tengah keterbatasan fiskal.

Memasuki akhir tahun anggaran, melalui Revisi ke-18 dan Revisi ke-19, dilakukan penetapan pagu akhir sekaligus pelepasan blokir, sehingga pagu anggaran efektif yang dapat dikelola ditetapkan sebesar Rp9.001.912.000. Pagu akhir tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun serta penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Secara keseluruhan, rangkaian proses efisiensi dan revisi anggaran selama tahun berjalan mencerminkan pengelolaan anggaran yang prudent, adaptif, dan berbasis prioritas, serta menunjukkan kemampuan satuan kerja dalam merespons kebijakan nasional tanpa mengorbankan akuntabilitas dan capaian kinerja utama. Penyesuaian anggaran dan restrukturisasi program diposisikan sebagai strategi penguatan tata kelola, bukan sebagai indikasi penurunan kinerja.

Penambahan program pada Revisi ke-11 yang disertai dengan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja utama, karena dilakukan melalui restrukturisasi program, reprioritisasi kegiatan, serta penguatan fungsi dukungan manajemen.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

##### **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)**

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan capaian kinerja utama Kementerian Agama sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diemban. IKSK dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang telah diidentifikasi secara sistematis dengan memperhatikan proses bisnis organisasi serta memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu relevan, terukur, dapat dicapai, dan berorientasi pada hasil.

Pada tingkat Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, IKSK yang digunakan merupakan indikator yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact) yang diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2025. Penetapan IKSK tersebut disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama, sehingga mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

##### **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam pengelolaan birokrasi modern, yang bertujuan untuk menjamin peningkatan kualitas layanan publik serta memperkuat akuntabilitas kinerja melalui kejelasan capaian hasil (outcome). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual (realisasi yang dicapai) dengan kinerja yang diharapkan (target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja).

Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala, baik triwulanan maupun tahunan, sebagai dasar pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja organisasi, pengukuran dilakukan terhadap masing-masing indikator sesuai dengan satuan ukur yang digunakan, yaitu:

- a. Indikator dengan satuan indeks, diukur berdasarkan hasil survei,

- baik survei internal maupun eksternal;
- b. Indikator dengan satuan angka, nilai rata-rata, predikat, atau opini, diperoleh dari data sekunder atau sumber resmi dari instansi/pihak yang berwenang;
- c. Indikator dengan satuan persentase, dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah capaian dengan total target masing-masing indikator.

Dalam pelaksanaannya, batas atas capaian kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, yaitu sebesar 120%, sedangkan batas bawah capaian kinerja ditetapkan sebesar 0%.

### **Kategori Capaian Kinerja**

Untuk memberikan interpretasi yang seragam terhadap hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja diklasifikasikan ke dalam empat kategori, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman yang berlaku, yaitu:

**Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja**

<b>No</b>	<b>Kategori</b>	<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kode</b>
1	Sangat Baik	> 100 - 120	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79,99	Kuning
4	Kurang	< 50	Merah

Klasifikasi capaian kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi acuan dalam perumusan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

### **Penyesuaian Pengukuran Kinerja akibat Revisi Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II mengenai Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar pada Tahun 2025 mengalami revisi sebagai tindak lanjut atas dinamika kebijakan penganggaran dan penyesuaian struktur program selama tahun berjalan. Revisi Perjanjian Kinerja tersebut berimplikasi

pada penyesuaian indikator kinerja dan target output yang menjadi dasar pengukuran kinerja organisasi.

Pada tahap awal pelaksanaan kinerja, Perjanjian Kinerja awal telah digunakan sebagai acuan pengukuran dan evaluasi kinerja pada Triwulan I dan Triwulan II. Hasil pengukuran kinerja pada periode tersebut telah dilakukan dan dinilai berdasarkan indikator serta target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja awal, sehingga capaian kinerja TW I dan TW II merupakan hasil evaluasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan diberlakukannya Perjanjian Kinerja hasil revisi pada periode berikutnya, maka untuk menjaga konsistensi, keterbandingan, dan kesinambungan pengukuran kinerja, capaian kinerja Triwulan I dan Triwulan II tetap digunakan sebagai bagian dari bahan evaluasi kinerja tahunan. Dalam konteks ini, capaian kinerja TW I dan TW II akan disajikan dalam bentuk rerata hasil evaluasi Triwulan I dan Triwulan II, sebelum dilakukan evaluasi kinerja akhir berdasarkan Perjanjian Kinerja hasil revisi.

Pendekatan penyajian rerata evaluasi Triwulan I dan Triwulan II dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja yang telah dilaksanakan dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja awal tetap mendapatkan pengakuan dalam evaluasi kinerja tahunan, sekaligus menjaga transisi pengukuran kinerja menuju Perjanjian Kinerja hasil revisi agar tetap objektif dan adil.

Dengan demikian, evaluasi kinerja tahunan Tahun 2025 dilakukan melalui dua tahapan pengukuran, yaitu:

1. Pengukuran kinerja Triwulan I dan Triwulan II berdasarkan Perjanjian Kinerja awal, yang disajikan dalam bentuk rerata capaian; dan
2. Pengukuran kinerja Triwulan III dan Triwulan IV berdasarkan Perjanjian Kinerja hasil revisi, yang menjadi dasar penilaian kinerja akhir.

Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas, konsistensi, dan kehati-hatian metodologis dalam pengukuran kinerja, sehingga hasil evaluasi kinerja akhir tetap merepresentasikan kinerja organisasi secara utuh meskipun terjadi revisi Perjanjian Kinerja di tengah tahun berjalan. Penyajian rerata evaluasi Triwulan I dan Triwulan II dilakukan untuk menjaga kesinambungan dan keterbandingan pengukuran kinerja akibat adanya revisi Perjanjian Kinerja, tanpa

menghilangkan pengakuan atas kinerja yang telah dinilai pada periode sebelumnya.

Adapun rerata capaian kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 untuk Perkin Awal**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi dan Capaian		Kategori
				Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Indeks Profesionalitas ASN	77,10	0	0	Kurang
		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	51,00	0	0	Kurang
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspiratif	3,00	0	0	Kurang
		Nilai kepuasan layanan kepagawaian	76,70	0	0	Kurang
<b>Rerata Capaian IKSK 1</b>					<b>0</b>	<b>Kurang</b>
2	Meningkatnya tata kualitas perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94,25	74,1	79	Cukup
		Persentase satuan kerja yang menyusun Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	100	0	0	Kurang

		Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu	75	0	0	Kurang
	<b>Rerata Capaian IKSK 2</b>				<b>26,33</b>	<b>Kurang</b>
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	60	92,79	120	Sangat Baik
	<b>Rerata Capaian IKSK 3</b>				<b>120</b>	<b>Sangat Baik</b>
4	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	100	85,71	86	Sangat Baik
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	91	4,75	5	Kurang
	<b>Rerata Capaian IKSK 4</b>				<b>45,5</b>	<b>Kurang</b>
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan, tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	15	15	100	Sangat Baik
		Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online	15	5	33,3	Kurang
		Nilai Akreditasi Perpustakaan	B	-	0	Kurang
	<b>Rerata Capaian IKSK 5</b>				<b>44,44</b>	<b>Kurang</b>
6	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen	100	100	100	Sangat Baik
		Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	100	100	100	Sangat Baik

		<b>Rerata Capaian IKSK 6</b>			<b>100</b>	<b>Sangat Baik</b>
7	Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan agama dan penguatan moderasi beragama	Persentase Naskah kebijakan Pembangunan Agama yang dimanfaatkan	91	0	0	Kurang
		Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat /Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76	0	0	Kurang
		Nilai Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama	76	0	0	Kurang
		<b>Rerata Capaian IKSK 7</b>			<b>0</b>	<b>Kurang</b>
8	Meningkatnya kualitas dan kebermanfaatan naskah kebijakan, Layanan Lektur dan Literasi Keagamaan	Persentase naskah kebijakan Lektur dan Literasi Keagamaan yang dimanfaatkan	91	0	0	Kurang
		<b>Rerata Capaian IKSK 8</b>			<b>0</b>	<b>Kurang</b>
		<b>Nilai Capaian Kinerja Balai Penelitian dan Pengembang Agama Makassar Tahun 2025</b>			<b>73,06</b>	<b>Cukup</b>

Pengukuran capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja awal dan merepresentasikan capaian kinerja kumulatif semester pertama (Triwulan I dan Triwulan II). Pada periode ini, pengukuran kinerja mencakup 19 indikator kinerja yang mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar pada aspek kebijakan, moderasi beragama, pengelolaan anggaran, penguatan sumber daya manusia, serta dukungan layanan dan digitalisasi.

Berdasarkan matriks capaian kinerja Triwulan II, pelaksanaan kinerja organisasi pada semester pertama berjalan sesuai dengan rencana. Sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian yang memenuhi dan melampaui target, dengan kategori capaian yang

didominasi Baik dan Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan berada dalam kendali organisasi serta didukung oleh perencanaan dan pengelolaan kinerja yang memadai.

Pada aspek kebijakan dan moderasi beragama, indikator-indikator yang mengukur pemanfaatan naskah kebijakan serta fasilitasi penguatan moderasi beragama menunjukkan hasil yang positif, mencerminkan relevansi output kebijakan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Sementara itu, pada aspek pengelolaan anggaran dan akuntabilitas, indikator-indikator kepatuhan pelaporan, perencanaan, dan pelaksanaan anggaran menunjukkan kinerja yang tertib dan sesuai standar.

Capaian pada aspek pengelolaan sumber daya manusia aparatur menggambarkan dukungan SDM yang memadai terhadap pelaksanaan tugas organisasi, baik melalui peningkatan profesionalisme ASN, perencanaan kebutuhan pegawai, maupun mekanisme apresiasi kinerja. Di sisi lain, indikator digitalisasi dan layanan pendukung, termasuk pengelolaan arsip, perpustakaan, dan layanan berbasis teknologi informasi, menunjukkan kemajuan yang mendukung efisiensi layanan dan transformasi digital organisasi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Triwulan II menjadi baseline evaluasi kinerja tahunan dan memberikan gambaran awal bahwa organisasi berada pada jalur yang tepat dalam mencapai target kinerja tahun berjalan. Hasil ini selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian dan penguatan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya, termasuk dalam konteks revisi Perjanjian Kinerja pada paruh kedua tahun.

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 untuk Perkin Revisi**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi dan Capaian		Kategori
				Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Kualitas Penguatan Moderasi Beragama dan Kebijakan Pembangunan	Persentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan	91	100	109,89	Sangat Baik

	Bidang Agama	Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76	85,35	112,30	Sangat Baik
	<b>Rerata Capaian IKSK 1</b>				<b>111,09</b>	<b>Sangat Baik</b>
2	Meningkatnya kualitas penguatan Moderasi Beragama dan Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Persentase Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan	91	300	120	Sangat Baik
		Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76	84,75	111,51	Sangat Baik
	<b>Rerata Capaian IKSK 2</b>				<b>115,75</b>	<b>Sangat Baik</b>
2	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM	Nilai Kinerja Anggaran	90	89,71	99,68	Baik
		Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja sesuai standar	75	92,79	120	Sangat Baik
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,25	96,92	102,83	Sangat Baik
		Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	80,95	94	116,12	Sangat Baik
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu	100	100	100	Sangat Baik

	Indeks Profesionalisme ASN	77,10	74	95,98	Baik
	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Rencana Kebutuhan Pegawai dan Rencana Pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	100	100	100	Sangat Baik
	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspiratif	3	3	100	Sangat Baik
	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	15	18	120	Sangat Baik
	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	5	23	120	Sangat Baik
	Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online	15	30	120	Sangat Baik
	Nilai Akreditasi Perpustakaan	C	B	120	Sangat Baik
	<b>Rerata Capaian IKSK 3</b>			<b>109,55%</b>	<b>Sangat Baik</b>
	<b>Nilai Capaian Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025</b>			<b>111%</b>	<b>Sangat Baik</b>

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja hasil revisi dan merepresentasikan capaian kinerja kumulatif akhir tahun (Triwulan III dan Triwulan IV). Pada periode ini, pengukuran kinerja mencakup 16 indikator kinerja yang telah disesuaikan melalui mekanisme konsolidasi dan penajaman indikator agar lebih mencerminkan output yang berada dalam kewenangan unit kerja.

Berdasarkan matriks capaian kinerja Triwulan IV, pelaksanaan kinerja organisasi pada akhir tahun menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Sebagian besar indikator kinerja berada pada kategori Baik dan Sangat Baik, yang mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menjaga kesinambungan kinerja serta meningkatkan kualitas output setelah diberlakukannya Perjanjian Kinerja hasil revisi.

Pada aspek kebijakan dan penguatan moderasi beragama, indikator-indikator yang mengukur penyusunan naskah kebijakan serta fasilitasi penguatan moderasi beragama pada berbagai kelompok sasaran menunjukkan capaian yang konsisten dan terarah. Hal ini mengindikasikan bahwa fokus program dan kegiatan pada paruh kedua tahun berjalan telah selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja hasil revisi.

Pada aspek pengelolaan anggaran dan akuntabilitas kinerja, indikator-indikator yang berkaitan dengan kinerja anggaran, pelaporan kinerja, pelaporan keuangan, dan pengelolaan BMN menunjukkan capaian yang tertib dan sesuai standar. Kondisi ini mencerminkan penguatan tata kelola kinerja dan pengendalian anggaran hingga akhir tahun, meskipun pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam konteks efisiensi anggaran.

Sementara itu, capaian pada aspek pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan dukungan layanan organisasi, termasuk digitalisasi arsip, pengelolaan perpustakaan, serta peningkatan konten dan layanan berbasis teknologi informasi, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini mencerminkan adaptasi organisasi terhadap kebutuhan transformasi digital serta peningkatan kualitas layanan internal dan eksternal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Triwulan IV menggambarkan bahwa organisasi tidak hanya mampu mempertahankan capaian kinerja semester pertama, tetapi juga menunjukkan penguatan dan pematapan kinerja pada paruh kedua tahun berjalan. Penyesuaian Perjanjian Kinerja di tengah tahun tidak menurunkan kinerja organisasi, melainkan mendukung penyederhanaan dan penajaman pengukuran kinerja sehingga capaian kinerja akhir tahun tetap terjaga secara akuntabel.

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa nilai capaian kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025

sebesar 111% dengan 3 sasaran kegiatan dan 16 indikator kinerja sasaran kegiatan, dengan penjelasan capaian masing-masing sasaran dan indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penguatan Moderasi Beragama dan Kebijakan Pembangunan Bidang Agama
  - a. Persentase Naskah Kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang Dihasilkan

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa proses penyusunan naskah kebijakan pembangunan bidang agama telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Naskah kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kuantitas yang direncanakan, tetapi juga mencerminkan fokus penguatan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan aktual serta isu-isu strategis pembangunan bidang agama. Dengan demikian, naskah kebijakan yang disusun berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam perumusan dan penyempurnaan kebijakan pembangunan bidang agama yang lebih terarah, responsif, dan berbasis bukti.

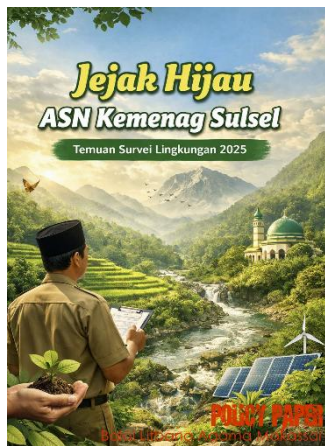
Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, sehingga capaian indikator pada tahun ini memiliki posisi strategis sebagai fondasi pencapaian target jangka menengah. Jika ditinjau dari capaian tahun berjalan, pemenuhan target indikator telah selaras dengan arah dan sasaran Renstra, baik dari sisi kuantitas maupun relevansi substansi kebijakan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada tahun awal Renstra telah berada pada jalur yang tepat dan mendukung pencapaian target kinerja jangka menengah organisasi.

Meskipun demikian, untuk mencapai target akhir Renstra pada Tahun 2029, masih diperlukan upaya peningkatan capaian secara bertahap dan berkelanjutan. Berdasarkan proyeksi Renstra, diperlukan tambahan capaian minimal sebesar 4% secara kumulatif pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan perencanaan kajian kebijakan yang lebih tematik dan strategis, peningkatan kualitas analisis kebijakan, serta optimalisasi pemanfaatan naskah kebijakan oleh pemangku kepentingan, agar capaian kinerja tidak hanya

berkelanjutan tetapi juga memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pembangunan bidang agama.

Terdapat 4 (empat) Naskah Kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang ditetapkan sebagai target pada Tahun 2025. Seluruh naskah kebijakan tersebut berhasil disusun dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan, sehingga capaian kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar pada indikator ini mencapai 100%. Keempat naskah kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1) Jejak Hijau ASN Kemenag Sulsel

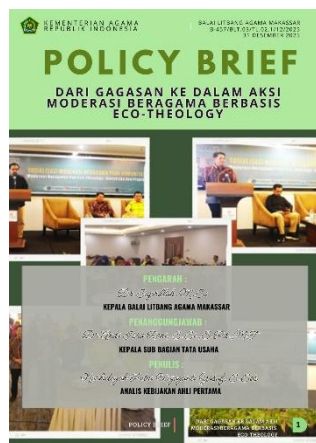


Indeks Kesadaran Lingkungan (IKL) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat pengetahuan dan sikap yang sangat tinggi, masing-masing mencapai 93% dan 95%. Namun, aspek perilaku ramah lingkungan masih menunjukkan kesenjangan dengan skor antara 74% hingga 83%. Hal ini menandakan bahwa meskipun ASN memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat, penerapan perilaku ekologis yang konsisten masih perlu ditingkatkan. Paper ini memberikan analisis komprehensif terhadap temuan survei, faktor penyebab kesenjangan, dampak terhadap efektivitas birokrasi hijau, dan menawarkan rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat internalisasi nilai ramah lingkungan melalui edukasi, budaya kerja, dan sistem insentif. Dengan pendekatan integratif berbasis nilai agama, ASN diharapkan menjadi teladan birokrasi berkeadaban ekologis. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah, khususnya di Sulawesi Selatan, memiliki indeks sangat tinggi pada aspek pengetahuan dan sikap, namun masih terdapat ruang peningkatan pada aspek perilaku nyata.



**Gambar 3.1** Infografis Kegiatan Indeks Kesadaran Lingkungan

2) Dari Gagasan ke dalam Aksi Moderasi Beragama berbasis Eco-Theology



Berbagai persoalan kerusakan lingkungan yang kian masif seperti pemanasan global, krisis air bersih dan pencemaran udara menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya memperkuat peran manusia dalam menjaga dan merawat ciptaan tuhan. Di sisi lain, tantangan ekstremisme dalam beragama turut memperburuk krisis kemanusiaan dan ekologi. Kedua tantangan ini berakar pada pemahaman keagamaan yang tidak seimbang dan minimnya kesadaran ekologis dalam praktik spiritual. Permasalahan ini menjadi strategis karena mengancam kelestarian lingkungan dan harmoni sosial. Apabila dikaitkan dengan perspektif eco-theology, moderasi beragama tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga menjaga keseimbangan dalam hubungan manusia dengan alam sebagai bagian dari ibadah



moderasi beragama sangat penting karena metode ini memadukan aspek visual, konseptual, dan kreatif sehingga memudahkan proses belajar dan internalisasi nilai. Mind map mendorong partisipasi aktif melalui diskusi, pembuatan cabang, dan penambahan contoh nyata. Bentuk visual dengan warna, simbol, dan cabang membantu otak memproses dan mengingat informasi lebih efektif dibandingkan teks Panjang. Dengan melihat peta konsep hal ini dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan moderasi beragama di lingkungannya sehingga dapat membantu dalam merancang strategi implementasi yang tepat. Dengan konsep mind mapping moderasi beragama ini dapat menjadi salah satu langkah yang ditempuh sebagai alternatif materi yang bisa disampaikan dalam melakukan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di berbagai kalangan komunitas.



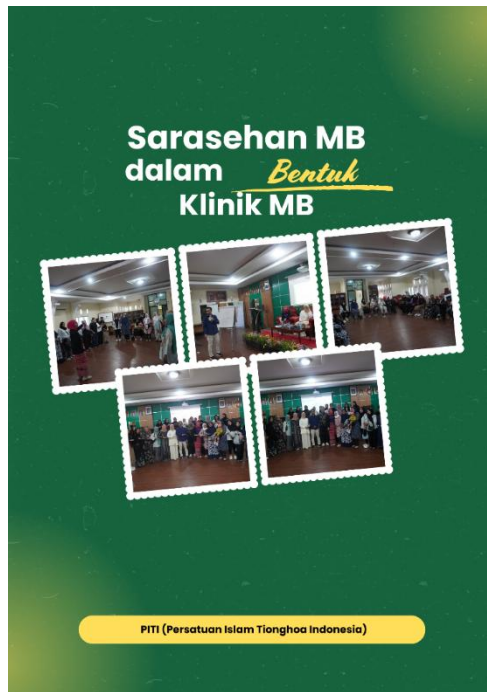
**Gambar 3.3** Infografis Kegiatan Indeks Kesadaran Lingkungan

- 4) Menjangkau Akar Rumput; Klinik Moderasi Beragama sebagai Model Edukasi Partisipatif



Salah satu inovasi program untuk memperkuat gerakan ini di tingkat akar rumput adalah Klinik Moderasi Beragama (Klinik MB), sebuah forum pembelajaran interaktif yang menghadirkan komunitas masyarakat, organisasi masyarakat, dan organisasi keagamaan ke Balai Litbang Agama

Makassar. Masalah utama sebagai dasar penyusunan kebijakan: (1) Kurangnya literasi moderasi beragama di tingkat komunitas, (2) Belum adanya wadah dialog yang intensif antarorganisasi lintas agama, (3) Kegiatan moderasi beragama masih bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan, (4) Kurangnya tenaga fasilitator atau narasumber yang kompeten, (5) Minimnya dukungan kebijakan dan pendanaan berkelanjutan, (6) Belum adanya sistem monitoring dan evaluasi program yang baku. Berdasarkan hasil analisis, berikut rekomendasi kebijakan yang disarankan untuk memperkuat keberlanjutan dan efektivitas Klinik MB: 1. Menetapkan Klinik Moderasi Beragama sebagai Program Nasional di Bawah Kementerian Agama, 2. Membangun Jejaring Kolaborasi Moderasi Beragama, 3. Menyusun Modul dan Kurikulum Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal, 4. Melakukan Pelatihan Nasional Fasilitator Klinik MB, 5. Menyediakan Dukungan Anggaran Khusus untuk Program Klinik MB, 6. Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu, 7. Mengembangkan Platform Digital Klinik MB, 8. Mendorong Replikasi Klinik MB di Tingkat Daerah. Setiap kabupaten/kota didorong untuk mengadakan Klinik MB versi lokal yang disesuaikan dengan konteks sosial-budaya masyarakat setempat.





**Gambar 3.4** Infografis Kegiatan Klinik MB

Penyusunan keempat naskah kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan peran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama yang berbasis kajian dan kebutuhan aktual pemangku kepentingan. Dengan terpenuhinya seluruh target naskah kebijakan yang ditetapkan, indikator Persentase Naskah Kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang Dihasilkan dapat dicapai secara optimal.

b. Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang Terfasilitasi Penguatan Moderasi Beragama

Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama yang dilaksanakan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar pada Tahun 2025 melibatkan populasi sebanyak 240 orang, yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh budaya. Berdasarkan perhitungan kebutuhan sampel, ditetapkan jumlah sampel minimal sebanyak 192 orang untuk mewakili populasi tersebut. Dari total populasi tersebut, sebanyak 212 orang responden bersedia mengisi kuesioner, atau sekitar 88,33% dari

total populasi, sehingga tingkat partisipasi responden tergolong sangat tinggi dan mencerminkan keterwakilan data yang baik.

Teknik pengumpulan data pada kegiatan ini dilakukan melalui kuesioner elektronik yang disebarakan kepada seluruh peserta kegiatan menggunakan tautan Google Form. Metode ini dipilih untuk memperoleh data persepsi responden secara langsung, objektif, dan efisien, serta mendukung pengolahan data yang akurat.

Berdasarkan hasil survei pemahaman moderasi beragama terhadap 212 responden tersebut, diperoleh hasil bahwa tingkat pemahaman responden berada pada kategori sangat tinggi, dengan nilai indeks rata-rata sebesar 85,36 pada skala 0–100. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penguatan moderasi beragama telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta, baik pada aspek konsep, sikap, maupun nilai-nilai moderasi beragama.

Berdasarkan simpulan hasil survei tersebut, beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh pimpinan antara lain: penguatan program berbasis segmentasi peserta, optimalisasi materi dan metode sosialisasi, integrasi penguatan moderasi beragama ke dalam program yang bersifat berkelanjutan, pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perencanaan program, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk mendukung perbaikan berkelanjutan.



**Gambar 3.5** Infografis Pengukuran Tingkat MB pada Tokoh Agama

Capaian indikator ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan penguatan moderasi beragama pada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh budaya. Target kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 76, dan berdasarkan hasil pengukuran diperoleh realisasi sebesar 85,53, sehingga capaian kinerja telah melampaui target tahun berjalan.

Lebih lanjut, capaian tersebut juga telah melampaui target akhir Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, yang ditetapkan sebesar 84. Dengan demikian, capaian indikator pada tahun awal pelaksanaan Renstra ini tidak hanya memenuhi target tahunan, tetapi juga telah mencapai sasaran kinerja jangka menengah lebih awal dari yang direncanakan.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas desain dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penguatan moderasi beragama yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan relevan dengan dinamika sosial budaya masyarakat. Mengingat peran strategis tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh budaya sebagai agen pengaruh di lingkungan masing-masing, capaian ini diharapkan memberikan efek pengganda (multiplier effect) dalam penyebaran nilai-nilai moderasi beragama secara lebih luas dan berkelanjutan.

Ke depan, tantangan utama bukan lagi pada pencapaian angka target, melainkan pada pemeliharaan dan pendalaman kualitas moderasi beragama, melalui perluasan jangkauan fasilitasi, penguatan materi berbasis isu aktual, serta pemanfaatan hasil pengukuran sebagai dasar penyempurnaan program agar dampak kebijakan tetap terjaga hingga akhir periode Renstra.

**Tabel 3.3 Analisa Keberhasilan/kegagalan Capaian Realisasi Kinerja dan Solusi yang dilakukan**

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
Persentase Naskah Kebijakan Pembangunan Bidang Agama	91	100	109,89	Capaian indikator melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh perencanaan kajian yang jelas, koordinasi tim yang	Memperkuat perencanaan tematik dan koordinasi tim agar

yang dihasilkan				efektif, serta dukungan manajemen dalam penyelesaian naskah kebijakan sesuai jadwal.	keberlanjutan capaian dan kualitas naskah kebijakan tetap terjaga.
Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76	85,35	112,3	Capaian indikator melebihi target karena metode fasilitasi yang partisipatif, materi yang kontekstual, serta keterlibatan aktif peserta dalam kegiatan penguatan moderasi beragama.	Mempertahankan pendekatan partisipatif dan memperluas segmentasi sasaran agar dampak penguatan moderasi beragama semakin berkelanjutan.

**Analisa dan rekomendasi atau solusi yang dilakukan pada Sasaran kegiatan (1)**

Meningkatnya kualitas penguatan Moderasi Beragama dan Kebijakan Pembangunan Bidang Agama

**Capaian Kinerja pada IKSK** Persentase Naskah Kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan

1. Melaksanakan fasilitasi penguatan moderasi beragama secara partisipatif melalui dialog lintas iman, lokakarya, dan forum komunikasi tokoh agama, masyarakat, dan budaya.
2. Menyusun dan menyebarkan materi penguatan moderasi beragama yang kontekstual sesuai karakteristik sosial dan budaya wilayah sasaran.
3. Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai *agent of change* dalam penyebarluasan nilai moderasi beragama di komunitasnya masing-masing.
4. Melakukan pengukuran indeks moderasi beragama secara berkala sebagai dasar evaluasi dan perbaikan program.
5. Memperkuat jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal untuk menjaga keberlanjutan dampak program penguatan moderasi beragama.

**Capaian Kinerja pada IKSK** Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama

1. Menyelenggarakan fasilitasi penguatan moderasi beragama melalui dialog lintas iman, forum tokoh agama dan masyarakat, serta lokakarya berbasis isu lokal.
2. Menyusun dan menggunakan instrumen pengukuran moderasi beragama untuk menilai perubahan sikap dan pemahaman peserta secara objektif.

3. Melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan budaya sebagai duta moderasi beragama dalam kegiatan sosialisasi dan pembinaan di komunitas masing-masing.
4. Mengintegrasikan hasil fasilitasi ke dalam jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal untuk memperluas dampak program.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan guna memastikan keberlanjutan penguatan moderasi beragama hingga akhir periode Renstra.

## 2. Meningkatnya kualitas penguatan Moderasi Beragama dan Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan

### a. Persentase Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa proses penyusunan naskah kebijakan di bidang pendidikan agama dan keagamaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pada Triwulan IV, naskah kebijakan yang dihasilkan telah memenuhi target kinerja tahun berjalan dan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual serta dinamika kebijakan pendidikan agama dan keagamaan.

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, sehingga capaian indikator ini memiliki peran strategis sebagai fondasi pencapaian target jangka menengah. Capaian pada tahun pertama Renstra menunjukkan bahwa arah penyusunan naskah kebijakan telah selaras dengan sasaran dan prioritas Renstra, khususnya dalam mendukung penguatan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Dengan capaian tersebut, naskah kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan target kinerja tahunan, tetapi juga menjadi rujukan awal dalam perumusan dan penyempurnaan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan pada tahun-tahun berikutnya. Ke depan, capaian ini perlu dijaga dan ditingkatkan secara bertahap agar target akhir Renstra 2025–2029 dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Target Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebanyak 1 (satu) naskah kebijakan. Dalam pelaksanaannya, Balai Penelitian dan

Pengembangan Agama Makassar berhasil menyusun sebanyak 3 (tiga) naskah kebijakan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang ditetapkan dengan nilai capaian maksimal 120%.

#### 1) Moving Class dan Visiting Class : Strategi Penguatan Moderasi Beragama di Kalangan Gen-Z



Pembelajaran moderasi beragama di lingkungan pendidikan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain pendekatan yang cenderung teoretis, minimnya ruang dialog lintas agama, serta tingginya paparan konten intoleran di media sosial yang tidak diimbangi dengan literasi digital

keagamaan yang memadai. Selain itu, format pembelajaran moderasi beragama belum sepenuhnya menyesuaikan dengan gaya belajar Gen Z yang visual, mobile, dan kolaboratif. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, program ini menghadirkan inovasi pembelajaran melalui Moving Class dan Visiting Class Moderasi Beragama, yang mengedepankan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), dialog lintas identitas, serta integrasi literasi digital keagamaan melalui konten multimedia. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh kolaborasi multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, pendidik, tokoh agama, komunitas, dan media digital. Pelaksanaan inovasi ini memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman moderasi beragama secara kontekstual, penguatan kompetensi dialog dan toleransi, serta pengurangan risiko intoleransi dan ekstremisme digital di kalangan Gen Z. Program ini juga berkontribusi pada terbentuknya ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan aman. Berdasarkan hasil pelaksanaan, rekomendasi kebijakan yang diajukan meliputi: penetapan Moving Class dan Visiting Class Moderasi Beragama sebagai program prioritas sekolah/madrasah, penguatan kapasitas fasilitator

tersertifikasi, pengembangan modul digital ramah Gen Z, dukungan pendanaan melalui skema BOS/DAK/Kemenag, serta penerapan monitoring dan evaluasi berbasis perubahan sikap dan perilaku.





**Gambar 3.6** Infografis Kegiatan Moving Class

2) Sekolah Penguatan Moderasi Beragama : Strategi menuju Laboratorium Moderasi Beragama



Program Sekolah Penguatan Moderasi Beragama (SPMB) merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat nilai moderasi lintas kelompok sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Dari 126 pendaftar, terpilih 60 peserta dari berbagai latar belakang yang mengikuti enam pertemuan intensif di

Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan dan Balai Litbang Agama Makassar melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan finalisasi. Program ini selaras dengan RPJMN 2020–2024, Renstra Kementerian Agama, dan visi Indonesia Emas 2045, serta menunjukkan dampak awal melalui implementasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) alumni berupa dialog lintas iman, pelatihan toleransi berbasis komunitas, dan kampanye digital moderasi beragama. Untuk memperkuat keberlanjutan, SPMB perlu ditetapkan sebagai program jangka panjang dengan Balai Litbang Agama Makassar sebagai penggerak kolaborasi lintas sektor pemerintah daerah, lembaga pendidikan, FKUB/ormas

keagamaan, media, dan komunitas serta didukung paket fasilitasi berupa coaching 90 hari, akses ruang dan perizinan, micro co-funding, dan publikasi digital. Keberhasilan program diukur melalui capaian minimal 70 persen RTL tuntas dalam 90 hari, replikasi lintas lembaga dan daerah, peningkatan jangkauan komunikasi publik, serta umpan balik positif dari mitra dan komunitas.



**Gambar 3.7** Infografis Kegiatan Sekolah MB

### 3) Dari Pelatihan ke Aksi Nyata : Short Course Moderasi Beragama



Moderasi beragama merupakan agenda strategis untuk menjaga kohesi sosial di tengah keragaman Indonesia. Meskipun IKUB nasional meningkat dari 73,83 (2019) menjadi 76,02 (2023), dampak program di tingkat akar rumput masih belum berkelanjutan karena pelatihan umumnya berhenti pada peningkatan pengetahuan tanpa tindak lanjut terukur. Studi di empat *pilot site* BLAM—Maros, Polewali Mandar, Manado, dan Palu—pada wilayah dengan kesiapan sosial tinggi (Sulawesi Tengah IKUB 2023 = 76,95; Kota Manado IKT 2023 = 6,400) menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas dan kampus efektif namun membutuhkan desain keberlanjutan. Policy paper ini merekomendasikan model integratif berkelanjutan yang menggabungkan pelatihan, mentoring 90 hari, *mini-grant* (Rp5–10 juta/proyek), dashboard M&E, dan sinergi kelembagaan (BMBPSDM, BLAM, Pemda, kampus, ormas), selaras Perpres 58/2023 dan RAN-PE 2021. Implementasi 12–18 bulan diharapkan menghasilkan alumni aktif, jejaring moderasi yang hidup, dan kontribusi terukur terhadap peningkatan IKUB/indikator toleransi daerah, sehingga moderasi beragama bergerak dari sekadar pelatihan menjadi ekosistem gerakan sosial berbasis data yang siap direplikasi nasional.



**Gambar 3.8** Infografis Kegiatan Short Course MB

- b. Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama

Jumlah populasi pada kegiatan Penguatan Moderasi Beragama yang dilaksanakan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar pada Tahun 2025 sebanyak 976 orang, yang terdiri dari tenaga pendidik (guru dan dosen) serta peserta didik (siswa dan mahasiswa). Berdasarkan perhitungan kebutuhan sampel, diperoleh jumlah sampel minimal sebanyak 781 orang. Dari total populasi tersebut, sebanyak 797 responden bersedia mengisi kuesioner, atau sekitar 81,66% dari total populasi, sehingga tingkat keterwakilan responden tergolong sangat baik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa skor moderasi beragama responden berada pada rentang 81–100, dengan nilai rata-rata sebesar 84,75 pada skala 0–100. Nilai rata-rata tersebut mengindikasikan bahwa tingkat moderasi beragama responden tergolong sangat tinggi. Pola sebaran data menunjukkan dominasi skor tinggi, dengan distribusi yang condong ke kiri dan konsentrasi nilai di sekitar rata-rata, yang menandakan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pemahaman moderasi beragama yang baik hingga sangat baik.



Gambar 3.9 Infografis Pengukuran Tingkat MB pada Pendidikan

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penguatan moderasi beragama pada pendidik, tenaga

kependidikan, dan peserta didik telah dilaksanakan secara efektif. Target kinerja indikator ini ditetapkan sama untuk Tahun 2025 hingga Tahun 2029, sehingga capaian pada setiap tahun menjadi bagian dari pemenuhan target jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.

Berdasarkan hasil pengukuran pada Tahun 2025, diperoleh realisasi sebesar 84,75, yang menunjukkan bahwa capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun berjalan, sekaligus telah memenuhi target akhir Renstra 2025–2029. Dengan demikian, capaian indikator pada tahun awal pelaksanaan Renstra ini telah berada pada level kinerja yang diharapkan untuk periode jangka menengah.

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas desain dan pelaksanaan kegiatan penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan, yang didukung oleh metode fasilitasi yang partisipatif, materi yang kontekstual, serta keterlibatan aktif pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Lingkungan pendidikan berperan strategis sebagai ruang internalisasi nilai-nilai moderasi beragama secara berkelanjutan.

Ke depan, fokus pengelolaan indikator ini tidak hanya diarahkan pada pencapaian angka target, tetapi pada pemeliharaan dan pendalaman kualitas moderasi beragama, melalui penguatan materi berbasis isu aktual, pengembangan model pembelajaran yang inovatif, serta pemanfaatan hasil pengukuran sebagai dasar penyempurnaan program. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi capaian hingga akhir periode Renstra 2025–2029 dan memastikan dampak kebijakan tetap berkelanjutan.

**Tabel 3.4 Analisa Keberhasilan/kegagalan Capaian Realisasi Kinerja dan Solusi yang dilakukan**

Indikator Kinerja	Target	Capaian		Analisa keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Jml	%		
Persentase Naskah Kebijakan Pendidikan	91	300	120	Capaian indikator melampaui target karena perencanaan kajian kebijakan difokuskan pada isu strategis pendidikan	Mempertahankan fokus kajian kebijakan

Agama dan Keagamaan yang dihasilkan				agama dan keagamaan serta didukung koordinasi tim penyusun yang efektif.	pada peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan serta mendorong pemanfaatan naskah kebijakan dalam perumusan program pendidikan.
Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76	84,75	111,51	Capaian indikator melebihi target berkat metode fasilitasi yang partisipatif dan materi penguatan moderasi beragama yang kontekstual dengan lingkungan pendidikan agama dan keagamaan.	Melanjutkan pendekatan pembelajaran partisipatif serta memanfaatkan hasil pengukuran sebagai dasar penyempurnaan program penguatan moderasi beragama di satuan pendidikan.

Analisa dan rekomendasi atau solusi yang dilakukan pada Sasaran kegiatan (2)

Meningkatnya kualitas penguatan Moderasi Beragama dan Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan

**Capaian Kinerja pada IKSK** Persentase Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan

1. Menyusun agenda penyusunan naskah kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang selaras dengan prioritas Renstra dan kebutuhan pemangku kepentingan.
2. Melaksanakan kajian kebijakan berbasis data lapangan dan praktik pendidikan agama dan keagamaan di satuan pendidikan.
3. Melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait dalam proses perumusan naskah kebijakan melalui FGD dan uji substansi.
4. Mendokumentasikan dan mendiseminasikan naskah kebijakan kepada pemangku kebijakan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan pendidikan agama dan keagamaan.
5. Melakukan evaluasi pemanfaatan naskah kebijakan sebagai dasar peningkatan kualitas dan keberlanjutan penyusunan kebijakan pada periode berikutnya.

**Capaian Kinerja pada IKSK** Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga

Kependidikan dan Peserta Didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama

1. Melaksanakan fasilitasi penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan melalui workshop, dialog interaktif, dan kegiatan pembelajaran berbasis nilai moderasi.
2. Mengembangkan materi dan metode penguatan moderasi beragama yang sesuai dengan karakteristik pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
3. Melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai penggerak utama dalam menanamkan nilai moderasi beragama di satuan pendidikan.
4. Melakukan pengukuran tingkat moderasi beragama secara berkala untuk memantau perubahan sikap dan pemahaman peserta.
5. Mengintegrasikan hasil fasilitasi ke dalam praktik pembelajaran dan budaya sekolah/madrasah guna menjaga keberlanjutan dampak hingga akhir periode Renstra.

3. Meningkatkan peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM

a. Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan hasil pemantauan pada sistem monitoring kinerja anggaran, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 82,50 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 96,92. Kombinasi kedua komponen tersebut menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 89,71, yang berada pada kategori baik.

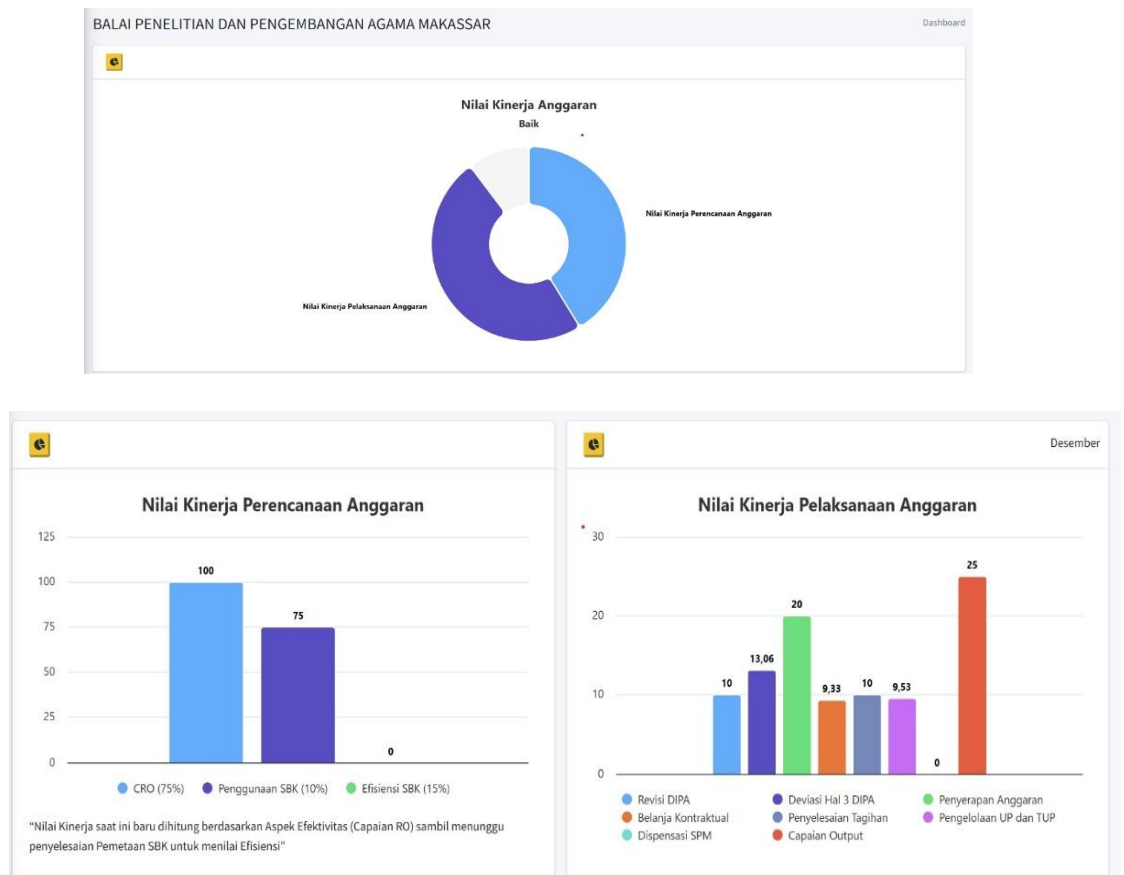
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 82,50 mencerminkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek konsistensi perencanaan, ketepatan penjabaran kegiatan, serta keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. Sementara itu, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang tinggi, yaitu 96,92, menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara sangat optimal, tertib, dan patuh terhadap ketentuan, baik dari sisi penyerapan, ketepatan waktu, maupun kepatuhan regulasi.

Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar menunjukkan kinerja yang akuntabel dan efektif, dengan kekuatan utama pada aspek pelaksanaan anggaran. Target Nilai Kinerja Anggaran untuk Tahun 2025 ditetapkan sebesar 90 dan meningkat secara bertahap

hingga mencapai 92 pada akhir periode Renstra Tahun 2029. Sementara itu, kondisi baseline pada Tahun 2024 telah berada pada level yang relatif tinggi, yaitu sebesar 97,65.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penetapan target Renstra dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan kinerja, mengingat pengelolaan anggaran telah berada pada tingkat kinerja yang baik sejak awal periode. Dengan capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 sebesar 99,68 persen, pengelolaan anggaran tetap menunjukkan konsistensi kinerja yang positif dan stabil.

Capaian ini menjadi dasar untuk mendorong perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek perencanaan anggaran. Ke depan, fokus pengelolaan diarahkan pada penguatan kualitas perencanaan agar keseimbangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat terjaga secara optimal, serta stabilitas kinerja pengelolaan anggaran dapat dipertahankan secara berkelanjutan sepanjang periode Renstra.



**Gambar 3.10** Nilai Kinerja Anggaran

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 92, realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 yang mencapai 99,68 persen menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran telah berada di atas target jangka menengah yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sejak awal periode Renstra, pengelolaan anggaran satuan kerja telah berada pada tingkat kinerja yang matang dan stabil.

Namun demikian, capaian yang lebih tinggi dari target akhir Renstra tersebut tidak serta-merta dimaknai sebagai selesainya upaya peningkatan kinerja, melainkan menjadi tantangan untuk menjaga konsistensi dan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, fokus pengelolaan pada periode selanjutnya diarahkan pada penguatan aspek perencanaan anggaran, pengendalian pelaksanaan, serta mitigasi risiko agar kinerja pengelolaan anggaran tetap terjaga dan selaras dengan prinsip keberlanjutan kinerja hingga akhir periode Renstra 2029.

b. Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja sesuai standar

Berdasarkan matriks capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025, indikator Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja sesuai standar digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan dan kualitas penyusunan laporan kinerja satuan kerja sesuai ketentuan SAKIP, meliputi struktur dokumen, kelengkapan substansi, konsistensi data, serta keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada Triwulan IV, indikator ini diposisikan sebagai indikator *pengunci* karena kualitas laporan kinerja akhir tahun menjadi penentu utama kredibilitas akuntabilitas kinerja satuan kerja secara keseluruhan.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Tim Perencanaan, Kinerja, Evaluasi, dan Pelaporan Sekretariat BMBPSDM terhadap Laporan Kinerja (LKj) Balai Litbang Agama Makassar Tahun 2024. Berdasarkan hasil penilaian, target ditetapkan sebesar 75, dengan realisasi sebesar 92,79, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai nilai maksimal sebesar 120 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan LKj telah memenuhi dan melampaui standar yang ditetapkan,



c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan dokumen Indikator Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan periode sampai dengan bulan Desember, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar memperoleh Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) akhir sebesar 96,92. Nilai tersebut mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang **sangat baik**, serta menunjukkan tingkat kepatuhan dan efektivitas pengelolaan anggaran yang tinggi.

Secara rinci, capaian IKPA BLAM menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran memperoleh nilai 93,55, kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 97,15, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran mencapai 100,00. Capaian ini menggambarkan bahwa meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada indikator-indikator pembentuk IKPA, BLAM memperoleh nilai maksimal (100,00) pada beberapa komponen strategis, antara lain revisi DIPA, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), serta capaian output. Sementara itu, indikator deviasi Halaman III DIPA memperoleh nilai 87,09, dan penyerapan anggaran belanja kontraktual memperoleh nilai 95,26, yang masih berada dalam kategori sangat baik dan menunjukkan pengendalian anggaran yang efektif.



Kementerian  
Keuangan

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN  
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)		
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan						Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output
1	Desember	136	025	425338	Nilai	100,00	87,09	100,00	93,33	100,00	95,26	100,00	96,92	100%	0,00	96,92	
				BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR	Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
					Nilai Akhir	10,00	13,06	20,00	9,33	10,00	9,53	25,00					
					Nilai Aspek	93,55			97,15			100,00					

**Gambar 3.12** Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Dengan capaian Nilai IKPA sebesar 96,92, indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini mencapai capaian kinerja sebesar

102,83 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar pada tahun berjalan telah dilaksanakan secara akuntabel, tertib, dan berkualitas, serta memberikan dukungan yang kuat terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Target Nilai IKPA untuk Tahun 2025 ditetapkan sebesar 94,25 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 95,25 pada akhir periode Renstra Tahun 2029. Dengan realisasi Nilai IKPA sebesar 96,92, capaian kinerja pada Tahun 2025 telah melampaui target tahunan sekaligus berada di atas target akhir Renstra. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja telah berada pada tingkat yang sangat baik sejak awal periode Renstra.

Ke depan, tantangan pengelolaan kinerja anggaran tidak lagi berfokus pada pencapaian angka target, melainkan pada upaya menjaga konsistensi dan stabilitas kinerja, khususnya melalui penguatan kualitas perencanaan anggaran dan pengendalian pelaksanaan agar kinerja pelaksanaan anggaran tetap terjaga secara berkelanjutan hingga akhir periode Renstra 2029.

- d. Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang sesuai standar dan tepat waktu

Capaian indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan ketertiban satuan kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Penilaian indikator dihitung berdasarkan rerata capaian laporan keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 dan Semester I Tahun Anggaran 2025, masing-masing sebesar 96 dan 92, sehingga diperoleh nilai rerata 94. Dengan target yang ditetapkan sebesar 80,95, capaian kinerja indikator ini mencapai 116,12% dan berada pada kategori *Sangat Baik*. Laporan keuangan pada kedua periode tersebut disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku dan disampaikan tepat waktu, sehingga mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan satuan kerja.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 84, capaian indikator pada tahun

berjalan telah melampaui sasaran kinerja jangka menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas penyusunan dan penyampaian laporan keuangan satuan kerja telah berada pada tingkat yang matang dan stabil. Ke depan, fokus pengelolaan diarahkan pada upaya menjaga konsistensi kualitas pelaporan serta penguatan aspek analisis keuangan agar kinerja pengelolaan keuangan tetap terjaga secara berkelanjutan hingga akhir periode Renstra.

MONITORING PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT SATKER PERIODE (AKHIREN) TAHUN 2024					MONITORING PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT SATKER PERIODE TAHUN 2025																				
No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Tepat Waktu	Nilai Standar Lap	Nilai Akhir	No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Tepat Waktu	Nilai Standar Lap	Nilai Akhir														
			Tanggal Upload	Nilai Laporan/Tambahan					Tanggal Upload	Nilai Laporan/Tambahan															
1	190019	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN PROVINSI ACEH	17/05/2025 1:14 pm	70	18	8	96	1	190019	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN PROVINSI ACEH	24/07/2025 8:53 pm	70	16	7	93										
2	425322	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA SEMARANG	08/05/2025 4:40 pm	70	16	3	89	2	425322	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA SEMARANG	28/07/2025 2:17 pm	70			70										
3	425338	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR	09/05/2025 1:10 pm	70	20	6	96	3	425338	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR	28/07/2025 11:48 am	70	17	5	92										
4	425344	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA	19/05/2025 9:39 am	70	18	5	93	4	425344	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA	30/07/2025 1:21 pm	70	16	5	91										
5	425350	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MEDAN	07/05/2025 9:55 am	70	17	0	87	5	425350	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MEDAN	12/07/2025 1:21 pm	70	17	5	92										
6	425389	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN RALEMBANG	08/05/2025 3:10 pm	70	18	5	94	6	425389	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN RALEMBANG	29/07/2025 4:41 pm	70	15	5	90										
7	425375	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN JAKARTA	09/05/2025 11:29 pm	70	19	7	96	7	425375	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN JAKARTA	28/07/2025 11:39 am	70	20	7	97										
8	425381	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN SURABAYA	19/05/2025 1:08 pm	70	22	2	96	8	425381	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN SURABAYA	31/07/2025 9:49 am	70			70										
9	425390	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN BANJARMASSIN	09/05/2025 1:10 pm	70	17	5	92	9	425390	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN BANJARMASSIN	18/07/2025 8:09 pm	70	21	5	96										
10	425401	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MAKASSAR	07/05/2025 8:08 am	70	21	5	96	10	425401	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MAKASSAR	24/07/2025 3:56 pm	70	15	5	90										
11	426179	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN BANDUNG	09/05/2025 9:58 am	70	15	5	90	11	426179	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN BANDUNG	29/07/2025 2:26 pm	70	21	5	96										
12	426185	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN SEMARANG	04/05/2025 12:44 pm	70	17	2	79	12	426185	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN SEMARANG	18/07/2025 8:29 pm	70	20	5	95										
13	426191	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN PADANG	09/05/2025 10:28 pm	70	17	5	92	13	426191	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN PADANG	13/07/2025 4:32 pm	70	17	5	92										
14	426201	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN PRAGA	08/05/2025 1:10 pm	70	19	7	96	14	426201	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN PRAGA	23/07/2025 7:18 am	70	17	2	89										
15	426202	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN AMBON	21/05/2025 6:52 am	70			60	15	426202	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN AMBON	19/07/2025 11:32 am	70	16	6	92										
16	426211	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MANADO	09/05/2025 9:03 am	70	22	8	100	16	426211	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MANADO	30/07/2025 6:44 am	70	21	7	98										
17	426220	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN PEKANBARU	09/05/2025 11:43 am	70	17	2	89	17	426220	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN PEKANBARU	31/07/2025 9:23 am	70			70										
18	426318	BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	09/05/2025 1:07 pm	70	18	5	93	18	426318	BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	30/07/2025 9:24 am	70			70										
19	690526	LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN BANDAR LAMPUNG	09/05/2025 11:43 am	70	17	2	89	19	690526	LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN BANDAR LAMPUNG	23/07/2025 2:44 pm	70	18	5	93										
20	690527	LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN PEKANBARU	09/05/2025 11:43 am	70	17	2	89	20	690527	LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN PEKANBARU	28/07/2025 10:14 pm	70	17	4	91										
21	888028	LAINLAH PENTUSHAKAN MUSHAFAH AL-QURAN (LPM) JAKARTA	09/05/2025 1:07 pm	70	18	5	93	21	888028	LAINLAH PENTUSHAKAN MUSHAFAH AL-QURAN (LPM) JAKARTA	29/07/2025 12:30 pm	70	13	7	90										
Total Nilai Semester 2 Tahun 2024											91,19		Total Nilai Semester 1 Tahun 2025											88,43	

Gambar 3.13 Penilaian Laporan Keuangan

e. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu

Indikator ini menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penilaian indikator didasarkan pada penyusunan dan penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang disusun sesuai ketentuan dan disampaikan tepat waktu. Dokumen RKBMN Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang. Berdasarkan hasil penilaian, indikator ini memperoleh nilai capaian sebesar 100 dan berada pada kategori **Sangat Baik**, sehingga mendukung efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan aset organisasi.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 100, capaian indikator pada tahun berjalan telah sepenuhnya memenuhi sasaran kinerja jangka menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola

perencanaan kebutuhan BMN telah berada pada tingkat yang optimal sejak awal periode Renstra. Ke depan, tantangan pengelolaan indikator ini bukan pada peningkatan nilai capaian, melainkan pada upaya menjaga konsistensi kepatuhan terhadap standar, ketepatan waktu penyusunan RKBMN, serta keselarasan perencanaan kebutuhan BMN dengan rencana kinerja dan penganggaran agar capaian kinerja dapat dipertahankan secara berkelanjutan hingga akhir periode Renstra 2029.

Gambar 3.14 Dokumen RKBMN

f. Indeks Profesionalisme ASN

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa pengelolaan profesionalisme ASN pada akhir tahun telah dilaksanakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sebagaimana tercermin pada tabel rekapitulasi pengukuran Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN). Pengukuran IP ASN dilakukan berdasarkan indikator kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN. Berdasarkan hasil pengukuran, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar memperoleh nilai IP ASN sebesar 74 dari target yang ditetapkan sebesar 77,10, sehingga capaian kinerja mencapai 95,98 persen.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 77,3, capaian IP ASN pada tahun berjalan masih berada di bawah sasaran kinerja jangka menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan profesionalisme ASN telah berjalan dengan baik, masih diperlukan penguatan yang lebih terarah dan berkelanjutan, khususnya pada aspek pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja ASN,

agar target Renstra dapat tercapai secara optimal pada akhir periode.

The image contains two spreadsheets. The left spreadsheet, titled 'STANDAR DEKORASI PERFORMA BERKUALITAS KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN KEMERDEKAAN', shows a detailed breakdown of performance indicators with columns for 'Indikator', 'Kategori', 'Sub-kategori', 'Uraian', 'Sifat', 'Skala', 'Masa Berlaku', 'Materi', 'Sumber Daya', 'Risiko', 'Kategori', 'Sub-kategori', 'Uraian', 'Sifat', 'Skala', 'Masa Berlaku', 'Materi', 'Sumber Daya', 'Risiko'. The right spreadsheet, titled 'IPASN', shows a summary of the indicators with columns for 'No', 'Indikator', 'Kategori', 'Sub-kategori', 'Uraian', 'Sifat', 'Skala', 'Masa Berlaku', 'Materi', 'Sumber Daya', 'Risiko', 'Nilai', 'Tahun', 'Kategori', 'Sub-kategori', 'Uraian', 'Sifat', 'Skala', 'Masa Berlaku', 'Materi', 'Sumber Daya', 'Risiko'.

**Gambar 3.15** Penghitungan IPASN

- g. Persentase Satuan Kerja yang memiliki Rencana Kebutuhan Pegawai dan Rencana Pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan

Indikator ini menilai kesesuaian perencanaan kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM aparatur dengan kebutuhan organisasi. Berdasarkan matriks capaian, indikator ini menunjukkan bahwa satuan kerja telah memenuhi kewajiban perencanaan SDM sebagai fondasi penguatan kinerja organisasi dan pengendalian beban kerja. Pemenuhan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), serta penyusunan peta jabatan telah dilaksanakan secara lengkap dan sesuai ketentuan, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100 persen.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa perencanaan kebutuhan SDM telah dilakukan secara terstruktur. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yang juga ditetapkan sebesar 100, capaian indikator pada tahun berjalan telah sepenuhnya memenuhi sasaran kinerja jangka menengah. Dengan demikian, tantangan ke depan tidak lagi pada pencapaian nilai capaian, melainkan pada upaya menjaga konsistensi kualitas perencanaan serta memperkuat aspek implementasi, khususnya realisasi pemenuhan kebutuhan pegawai yang dipengaruhi oleh kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Ke depan, penguatan diarahkan pada penyempurnaan analisis beban kerja, pemutakhiran data kebutuhan pegawai, serta sinkronisasi rencana kebutuhan dengan rencana kinerja dan peta jabatan agar capaian kinerja dapat dipertahankan secara berkelanjutan hingga akhir periode Renstra.





**Gambar 3.17** Sertifikat Penghargaan

i. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses

Indikator ini menilai kemajuan transformasi pengelolaan arsip melalui penerapan digitalisasi dan kemudahan akses. Berdasarkan matriks capaian, indikator ini menunjukkan bahwa sistem digitalisasi arsip telah diimplementasikan dan mendukung efisiensi administrasi, percepatan layanan internal, serta peningkatan keterlacakan dokumen. Digitalisasi arsip juga berperan dalam memperkuat eviden kinerja, karena dokumen pendukung program dan kegiatan dapat disimpan, diakses, dan diverifikasi secara lebih cepat, sehingga memberikan kontribusi tidak langsung terhadap penguatan SAKIP dan kualitas pelaporan kinerja.

Dalam rangka mendukung digitalisasi kearsipan tersebut, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar telah mengembangkan dan memanfaatkan beberapa aplikasi internal, antara lain:

1. **SIDUPPA**, aplikasi pengelolaan data kepegawaian BLAM yang mencakup identitas pegawai, jenjang pendidikan, kepangkatan, jabatan, penugasan, dan data kepegawaian lainnya.
2. **SIPURIO**, aplikasi pengisian biodata peserta dan narasumber pada setiap kegiatan BLAM.
3. **SIPATTUJU**, aplikasi pertanggungjawaban kegiatan, termasuk

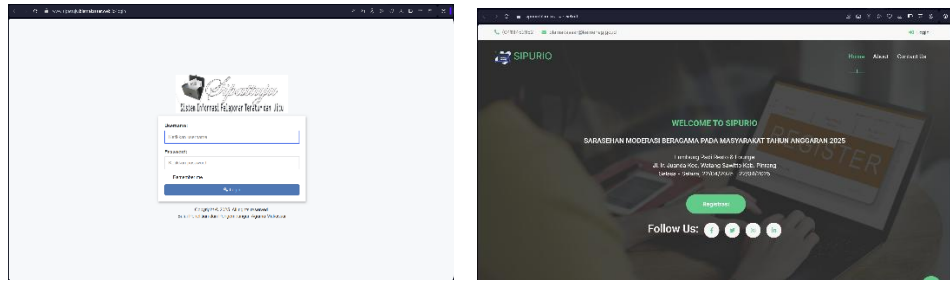
laporan kegiatan dan perjalanan dinas.

4. **SIEDI**, aplikasi pengelolaan persuratan, nota dinas, dan pengajuan cuti.
5. **Perpustakaan Digital BLAM**, aplikasi layanan perpustakaan digital dan akses koleksi secara daring.
6. **SINTA**, aplikasi *tracking* dan penelusuran arsip secara digital.
7. **SIMKEU BLAM**, aplikasi pendukung pelaksanaan anggaran, khususnya dalam proses pencairan dan dokumentasi keuangan.

Pemanfaatan berbagai aplikasi tersebut menunjukkan komitmen satuan kerja dalam membangun sistem digitalisasi arsip yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan pengelolaan arsip dan administrasi organisasi. Ke depan, penguatan diarahkan pada standarisasi klasifikasi arsip, integrasi antar-aplikasi, serta penjaminan keamanan data untuk menjaga keberlanjutan sistem digitalisasi.

Selain aplikasi internal tersebut, digitalisasi kearsipan juga diperkuat melalui pemanfaatan aplikasi kearsipan nasional SRIKANDI sebagai sistem utama pengelolaan arsip dinamis. Dengan dukungan 7 (tujuh) aplikasi internal dan 1 (satu) aplikasi nasional, capaian implementasi digitalisasi arsip secara kumulatif mencapai 18% dari target 15%, sehingga indikator ini melampaui target yang ditetapkan. Dengan demikian, nilai akhir capaian kinerja indikator ini mencapai 120% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.





**Gambar 3.18** Aplikasi Digital Kearsipan

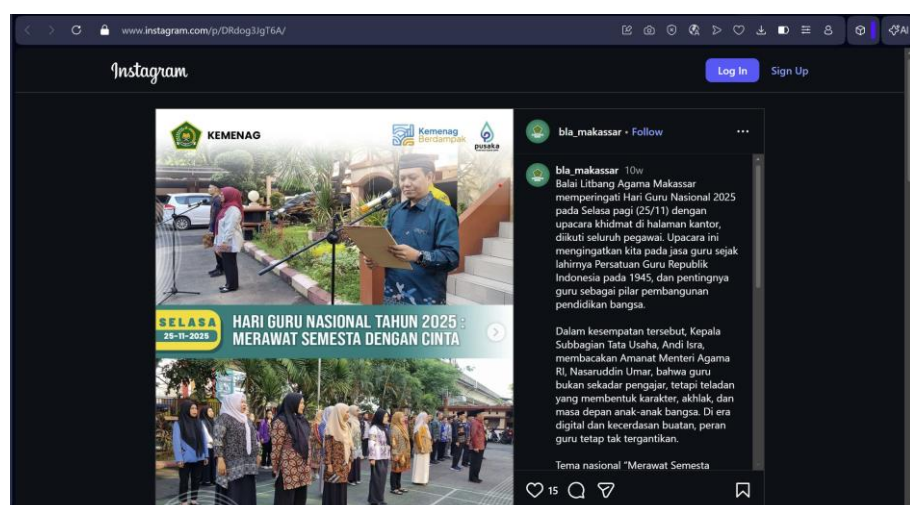
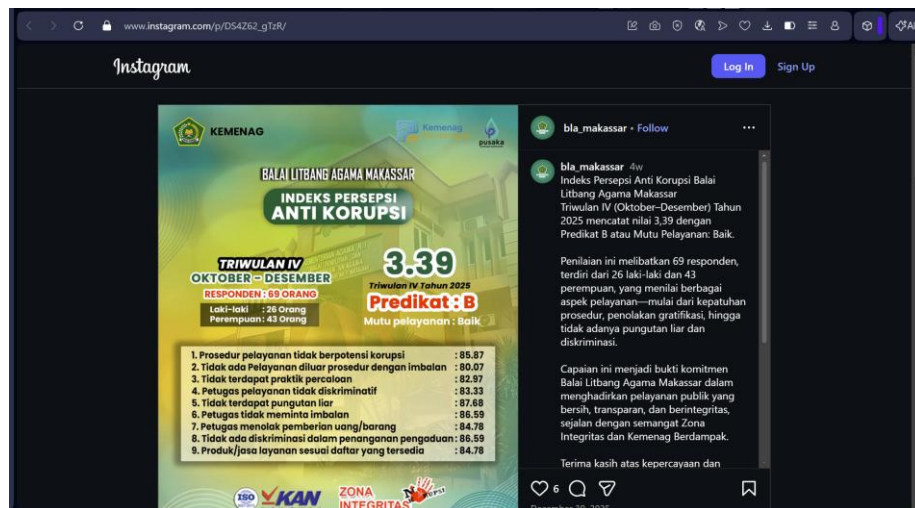
Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 55, capaian indikator digitalisasi kearsipan pada tahun berjalan telah melampaui sasaran kinerja jangka menengah secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan arsip melalui digitalisasi telah berada pada fase yang maju sejak awal periode Renstra. Dengan capaian yang telah melampaui target akhir Renstra, fokus pengelolaan ke depan tidak lagi pada penambahan kuantitas implementasi, melainkan pada penguatan kualitas pengelolaan arsip digital, integrasi antar-sistem, serta peningkatan keamanan dan keberlanjutan pengelolaan arsip agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara optimal hingga akhir periode Renstra 2029.

- j. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi

Indikator ini mencerminkan peningkatan diseminasi konten keagamaan dan pendidikan sebagai bagian dari upaya penguatan layanan informasi kepada masyarakat. Target indikator ditetapkan sebesar 5 persen dari jumlah konten tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar menghasilkan sebanyak 402 konten media sosial, sehingga target konten yang harus dihasilkan pada Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 406 konten.

Penetapan target tersebut menyebabkan capaian indikator ini belum dapat terealisasi secara optimal pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III, karena tambahan konten yang dipersyaratkan bersifat kumulatif dan baru dapat dicapai pada akhir tahun. Realisasi indikator ini tercapai pada Triwulan IV, dengan jumlah konten yang dihasilkan mencapai 499 konten, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan.

Dengan realisasi tersebut, peningkatan jumlah konten yang dihasilkan mencapai 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga nilai capaian kinerja indikator ini mencapai batas maksimal sebesar 120 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 9 persen, capaian pada Tahun 2025 telah melampaui sasaran kinerja jangka menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya diseminasi konten keagamaan dan pendidikan telah berada pada jalur yang tepat sejak awal periode Renstra. Ke depan, fokus pengelolaan diarahkan pada menjaga konsistensi kualitas dan relevansi konten agar peningkatan kuantitas diseminasi tetap diiringi dengan penguatan substansi hingga akhir periode Renstra 2029.

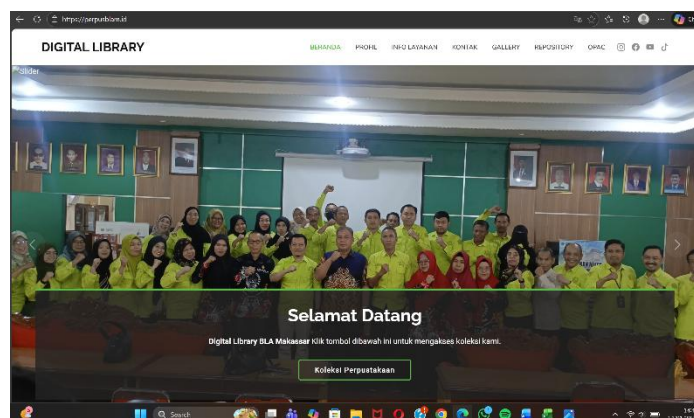


**Gambar 3.19** Konten Media Sosial

- k. Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online

Indikator ini menilai tingkat aksesibilitas koleksi digital perpustakaan. Berdasarkan matriks capaian, indikator ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penyediaan layanan informasi dan literasi yang mendukung fungsi penelitian, pengembangan kebijakan, serta layanan pengetahuan. Baseline produk digital perpustakaan pada Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 138 judul buku. Hingga Triwulan IV, jumlah koleksi yang berhasil didigitalisasi mencapai 40 judul buku, sehingga realisasi pemenuhan target melebihi ketentuan yang ditetapkan, yaitu sebesar 30 persen. Dengan capaian tersebut, nilai capaian kinerja indikator ini mencapai batas maksimal sebesar 120 persen.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 50 persen, capaian pada Tahun 2025 telah mencapai lebih dari separuh sasaran kinerja jangka menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan aksesibilitas koleksi digital perpustakaan telah berada pada jalur yang tepat sejak awal periode Renstra. Ke depan, fokus pengelolaan diarahkan pada percepatan digitalisasi koleksi secara bertahap dan berkelanjutan, disertai penguatan kualitas layanan dan pemanfaatan koleksi digital agar target akhir Renstra 2029 dapat tercapai secara optimal.



HAPUS	SLITING	JUDUL	ISBN/ISSN	SALIN	PERUBAHAN TERAKHIR
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Warisan Pemikiran Ulama Nusantara di Bumi Kalimantan <i>Dr. Muhammad Abdullah</i>	978-602-90583-1-7	1	2026-01-14 10:29:24
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Inventarisasi Karya Ulama di Lembaga Pendidikan Keagamaan <i>Dr. Ahmad Ruzman Ridwan</i>	978-602-8356-06-7	1	2026-01-15 10:31:05
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Renungan Spiritual Ebiat G. Ade <i>A. Widiatun Jangkar</i>	979-96751-4-3	2	2026-01-15 10:18:19
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Problematisa Madrasah Era Otonomi Daerah <i>Dr. Imran Saegar - Drs. Usul Hidayat (Eds.)</i>	978-979-787-100-4	1	2026-01-12 10:05:16
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nilai-Nilai Islam dalam Puiti Lama Indonesia <i>Dra. Fauziah Rahman, MA</i>	978-602-86620-2-4	1	2026-01-12 09:40:12
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia	979-3581-09-2	1	2026-01-12 08:59:11

	HAPUS	SUNTING	JUDUL	ISBN/ISSN	SALIN	PERUBAHAN TERAKHIR
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Warisan Pemikiran Ulama Nusantara di Bumi Kalimantan <i>Dr. Muhammad Abubakar</i>	978-602-90580-1-7	1	2024-01-14 11:29:24
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Inventarisasi Karya Ulama di Lembaga Pendidikan Keagamaan <i>Dr. Jannah-Rahman, MAg (ed)</i>	978-602-8786-08-7	1	2024-01-15 10:54:05
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Renungan Spiritual Ebet G. Ade <i>A. Wawan Singsing</i>	979-96730-4-3	2	2024-01-15 10:11:19
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Problematisa Madrasah Era Otonomi Daerah <i>Dr. Jannah Singsing - Drs. Umar Hidayat (Eds)</i>	978-679-797-130-4	1	2024-01-12 10:05:56
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Nilai-Nilai Islam dalam Pula Lomo Indonesia <i>Drs. Faridul Rahman, MA</i>	978-602-88620-2-4	1	2024-01-12 09:40:12
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia <i>Dr. Jannah Singsing</i>	979-3561-09-2	1	2024-01-12 08:59:11

**Gambar 3.20** Koleksi Digital Perpustakaan

## 1. Nilai Akreditasi Perpustakaan

Capaian nilai akreditasi perpustakaan mencerminkan bahwa pengelolaan perpustakaan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan serta mendukung peningkatan kualitas layanan perpustakaan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Target akreditasi perpustakaan ditetapkan pada peringkat C, dan berdasarkan hasil penilaian diperoleh peringkat B. Dengan capaian tersebut, indikator ini melampaui target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai nilai maksimal sebesar 120 persen dan termasuk dalam kategori *Sangat Baik*.

Proses pencapaian akreditasi tersebut memerlukan waktu persiapan yang cukup panjang, terutama dalam pemenuhan eviden penilaian yang relatif banyak dan beragam, yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan akreditasi.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yang ditetapkan pada peringkat A, capaian akreditasi perpustakaan pada tahun berjalan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan sebagai tahap antara menuju standar mutu tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fondasi pengelolaan perpustakaan telah terbentuk dengan baik. Ke depan, penguatan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, kelengkapan koleksi, pemanfaatan teknologi informasi, serta konsistensi pemenuhan eviden agar target akreditasi A pada akhir periode Renstra dapat tercapai secara optimal.



**Gambar 3.21** Akreditasi Perpustakaan

<b>Tabel 3.5 Analisa Keberhasilan/kegagalan Capaian Realisasi Kinerja dan Solusi yang dilakukan</b>					
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>		<b>Analisa keberhasilan/kegagalan</b>	<b>Solusi yang dilakukan</b>
		<b>Jml</b>	<b>%</b>		
Nilai Kinerja Anggaran	90	89,71	99,68	Capaian menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan akuntabel dan efektif. Baseline kinerja yang sudah tinggi menuntut konsistensi dan pengendalian risiko agar kualitas tetap terjaga.	Penguatan kualitas perencanaan anggaran dan pengendalian pelaksanaan untuk menjaga stabilitas kinerja sepanjang periode Renstra.
Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja sesuai standar	75	92,79	120	Kualitas penyusunan LKj telah memenuhi dan melampaui standar, menjadi indikator pengunci kredibilitas akuntabilitas kinerja satker.	Penajaman analisis kinerja, faktor penyebab deviasi, dan rekomendasi perbaikan agar LKj semakin bernilai sebagai dokumen manajerial.
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,25	96,92	102,83	Pelaksanaan anggaran berada di atas target tahunan dan target akhir Renstra, mencerminkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan anggaran.	Menjaga konsistensi kinerja IKPA melalui penguatan perencanaan dan mitigasi risiko deviasi pada tahun berjalan.

Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	80,95	94	116,12	Penyusunan laporan keuangan tertib, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi, melampaui target Renstra.	Mempertahankan kualitas pelaporan serta memperkuat analisis keuangan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas berkelanjutan.
Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu	100	100	100	Perencanaan kebutuhan BMN telah optimal dan memenuhi target maksimum Renstra sejak awal periode.	Menjaga konsistensi kepatuhan dan memastikan keselarasan RKBMN dengan rencana kinerja dan penganggaran.
Indeks Profesionalisme ASN	77,10	74	95,98	Pengelolaan profesionalisme ASN berjalan baik, namun capaian masih di bawah target akhir Renstra, terutama pada aspek kompetensi dan kinerja.	Penguatan pengembangan kompetensi, peningkatan kinerja individu, dan optimalisasi manajemen talenta ASN.
Persentase Satuan Kerja yang memiliki Rencana Kebutuhan Pegawai dan Rencana Pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	100	100	100	Pemenuhan ANJAB, ABK, dan peta jabatan telah lengkap dan sesuai ketentuan, mencapai target Renstra.	Penyempurnaan analisis beban kerja dan pemutakhiran data kebutuhan pegawai, serta sinkronisasi dengan rencana kinerja.
Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspirasi	3	3	100	Mekanisme apresiasi kinerja ASN telah berjalan dan berkontribusi pada pencapaian target kumulatif Renstra.	Menjaga konsistensi dan pemerataan pemberian penghargaan untuk memperkuat budaya kinerja.
Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	15	18	120	Implementasi digitalisasi arsip melampaui target tahunan dan target akhir Renstra, didukung pemanfaatan aplikasi internal dan nasional.	Penguatan integrasi sistem, standarisasi klasifikasi arsip, dan penjaminan keamanan

					data.
Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	5	23	120	Capaian bersifat kumulatif dan baru terealisasi optimal pada Triwulan IV, namun secara total melampaui target Renstra.	Menjaga konsistensi produksi konten dan meningkatkan kualitas serta relevansi substansi.
Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online	15	30	120	Digitalisasi koleksi menunjukkan kemajuan signifikan dan berada pada jalur pencapaian target akhir Renstra.	Percepatan digitalisasi koleksi, peningkatan kualitas metadata, dan optimalisasi pemanfaatan koleksi digital.
Nilai Akreditasi Perpustakaan	C	B	120	Peringkat akreditasi melampaui target tahunan, menunjukkan fondasi pengelolaan perpustakaan yang kuat menuju target Renstra.	Pemeliharaan mutu layanan, pemenuhan eviden secara berkelanjutan, dan peningkatan kualitas layanan untuk mencapai akreditasi tertinggi.

Analisa dan rekomendasi atau solusi yang dilakukan pada Sasaran kegiatan (3)

Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM

**Capaian Kinerja pada IKSK** Nilai Kinerja Anggaran

1. Melakukan reuiu RKA secara triwulanan untuk memastikan kesesuaian antara target kinerja dan alokasi anggaran.
2. Menyusun *early warning system* deviasi anggaran melalui monitoring realisasi bulanan.

**Capaian Kinerja pada IKSK** Persentase Laporan Kinerja Satuan Kerja sesuai standar

1. Membentuk tim kecil penjaminan mutu LKj untuk melakukan reuiu substansi sebelum penyampaian laporan.
2. Menyusun matriks keterkaitan sasaran-indikator-realisasi-eviden sebagai alat kendali kualitas laporan.

**Capaian Kinerja pada IKSK** Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

1. Melakukan pemantauan indikator IKPA secara rutin dan menindaklanjuti indikator yang berpotensi menurunkan nilai.
2. Mempercepat proses penyelesaian tagihan dan pengendalian belanja kontraktual.

**Capaian Kinerja pada IKSK** Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

1. Menyusun jadwal tetap penyusunan laporan keuangan semesteran dan melakukan rekonsiliasi data secara berkala.
2. Memperkuat koordinasi dengan unit terkait untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu laporan.

**Capaian Kinerja pada IKSK** Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang sesuai standar dan tepat waktu

1. Melakukan pemutakhiran data BMN dan kebutuhan aset secara periodik.
2. Menyelaraskan penyusunan RKBMN dengan rencana kinerja dan penganggaran tahunan.

**Capaian Kinerja pada IKSK** Indeks Profesionalisme ASN

1. Menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN berbasis hasil pengukuran IP ASN.
2. Mengikutsertakan ASN dalam pelatihan dan penugasan yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

**Capaian Kinerja pada IKSK** Persentase Satuan Kerja yang memiliki Rencana Kebutuhan Pegawai dan Rencana Pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan

1. Melakukan reviu dan pemutakhiran ANJAB, ABK, dan peta jabatan secara berkala.
2. Mengintegrasikan rencana kebutuhan pegawai dengan perencanaan kinerja unit kerja.

**Capaian Kinerja pada IKSK** Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspiratif

1. Menetapkan mekanisme penilaian kinerja individu yang transparan sebagai dasar pemberian penghargaan.
2. Melaksanakan pemilihan pegawai teladan secara rutin dan terdokumentasi.

**Capaian Kinerja pada IKSK** Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses

1. Mengimplementasikan aplikasi digitalisasi arsip internal dan mengintegrasikannya dengan aplikasi kearsipan nasional SRIKANDI.
2. Menyusun standar klasifikasi dan tata kelola arsip digital.

**Capaian Kinerja pada IKSK** Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi

1. Menyusun kalender editorial konten keagamaan dan pendidikan secara tahunan.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk diseminasi informasi.

**Capaian Kinerja pada IKSK** Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online

1. Melakukan digitalisasi koleksi perpustakaan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan pengguna.
2. Meningkatkan kualitas metadata dan kemudahan akses koleksi digital.

**Capaian Kinerja pada IKSK** Nilai Akreditasi Perpustakaan

1. Menyusun dan memelihara *bank eviden* akreditasi perpustakaan secara berkelanjutan.
2. Melakukan perbaikan layanan, sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan peringkat akreditasi.

## **B. Capaian Kinerja Anggaran**

### **1. Realisasi Anggaran**

Pengelolaan anggaran merupakan instrumen strategis dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena itu, capaian kinerja anggaran mencerminkan sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pada Tahun Anggaran 2025, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar mengelola anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas Renstra serta perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum, pelaksanaan anggaran pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar menunjukkan kinerja yang tertib dan akuntabel. Hal ini tercermin dari konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara, serta dukungan anggaran terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja. Capaian kinerja anggaran tersebut menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas tata kelola keuangan sekaligus mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja satuan kerja secara berkelanjutan.

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran**  
**Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar**  
**Tahun Anggaran 2025**

Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
9.001.912.000	9.001.110.350	99,99	801.650

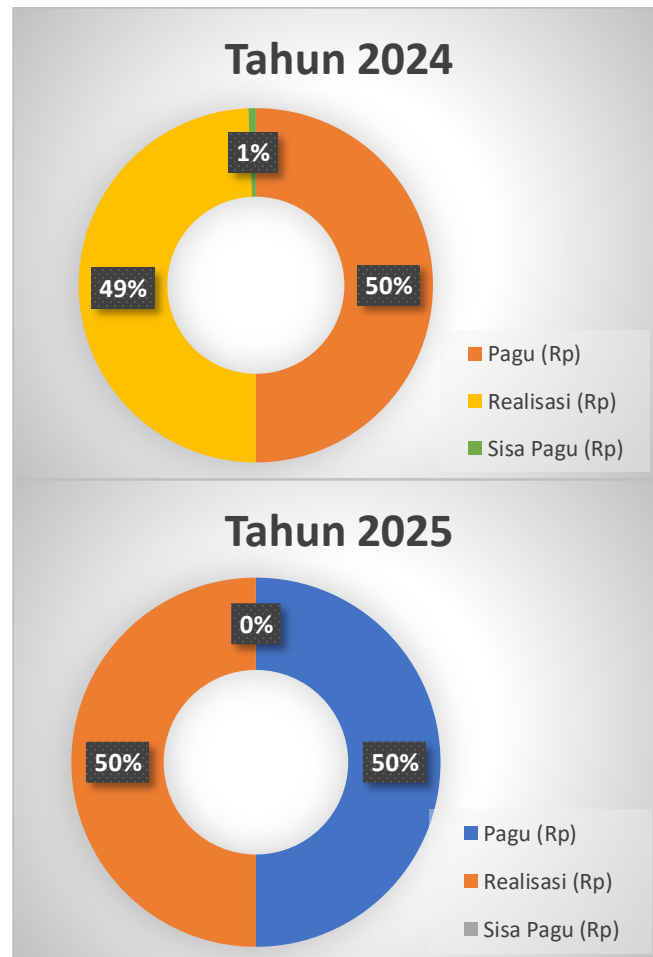
Berdasarkan data pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar mengelola pagu anggaran sebesar Rp9.001.912.000,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp9.001.110.350,- atau 99,99%, sehingga menyisakan sisa pagu sebesar Rp801.650,-. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan sangat optimal dan mendekati penyerapan penuh.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, besaran pagu anggaran tersebut merupakan hasil dari serangkaian revisi anggaran yang dilakukan sepanjang tahun berjalan hingga akhir tahun, termasuk penyesuaian atas kebijakan efisiensi, penataan kembali alokasi belanja, serta penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, pagu anggaran akhir sebagaimana tersaji dalam tabel di atas telah mencerminkan kondisi anggaran yang final dan menjadi dasar pengukuran realisasi serta capaian kinerja anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025.

Sisa pagu anggaran sebesar Rp801.650,- atau 0,01% dari total pagu menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien dan terkendali. Sisa anggaran tersebut tidak mencerminkan kegagalan pelaksanaan kegiatan, melainkan merupakan dampak dari efisiensi belanja, optimalisasi harga satuan, serta penyesuaian riil kebutuhan pada tahap akhir pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini mencerminkan kehati-hatian satuan kerja dalam membelanjakan anggaran negara serta komitmen untuk menghindari pemborosan tanpa mengurangi kualitas output dan capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Efisiensi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan selaras, dengan pengendalian yang memadai hingga akhir tahun anggaran. Dengan tingkat realisasi yang sangat tinggi dan sisa pagu yang minimal, Balai

Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar mampu menjaga keseimbangan antara efektivitas pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.



**Gambar 3.22** *Pagu Realisasi Belanja*

Berdasarkan data pengelolaan anggaran, pada Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp12.490.619.000, dengan realisasi anggaran mencapai Rp12.321.690.348 atau 98,65%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan mendukung pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan. Adapun sisa pagu sebesar Rp168.928.652 merupakan bagian dari efisiensi pelaksanaan kegiatan serta optimalisasi penggunaan anggaran, tanpa berdampak pada ketercapaian output dan outcome program/kegiatan.

Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp9.001.912.000, dengan realisasi anggaran mencapai Rp9.001.110.350 atau 99,99%. Tingkat penyerapan anggaran ini menunjukkan peningkatan kinerja pengelolaan anggaran yang sangat

signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sisa pagu hanya sebesar Rp801.650. Kondisi tersebut mencerminkan semakin baiknya kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan kegiatan, serta efektivitas pengendalian anggaran sepanjang tahun berjalan.

Secara keseluruhan, meskipun pagu anggaran Tahun 2024 lebih besar dibandingkan Tahun Anggaran 2025, namun tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang lebih optimal. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja dan penguatan nilai SAKIP.

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja**  
**Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar**  
**Tahun Anggaran 2025**

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	5.536.935.000	5.536.762.021	99,99
2	Belanja Barang	3.392.277.000	3.391.648.452	99,98
3	Belanja Modal	72.700.000	72.699.877	99,99
<b>TOTAL</b>		<b>9.001.912.000</b>	<b>9.001.110.350</b>	<b>99,99</b>

Berdasarkan rincian realisasi anggaran menurut jenis belanja, seluruh komponen belanja pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tingkat serapan yang sangat optimal, dengan capaian mendekati 100 persen pada masing-masing jenis belanja.

Pada Belanja Pegawai, dari pagu sebesar Rp5.536.935.000, realisasi anggaran mencapai Rp5.536.762.021 atau 99,99 persen. Tingginya tingkat realisasi ini mencerminkan ketepatan perencanaan kebutuhan belanja pegawai serta tertibnya pelaksanaan pembayaran hak-hak pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Belanja Barang memiliki pagu sebesar Rp3.392.277.000 dengan realisasi sebesar Rp3.391.648.452 atau 99,98 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan

operasional, penelitian, dan dukungan manajemen telah dilaksanakan secara efisien dan efektif, dengan pengendalian belanja yang baik tanpa mengurangi kualitas output kegiatan.

Sementara itu, Belanja Modal dari pagu sebesar Rp72.700.000 terealisasi sebesar Rp72.699.877 atau 99,99 persen. Realisasi yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa pengadaan aset pendukung telah direncanakan dan dilaksanakan secara tepat sasaran serta sesuai kebutuhan organisasi.

Secara keseluruhan, total pagu anggaran sebesar Rp9.001.912.000 telah direalisasikan sebesar Rp9.001.110.350 atau 99,99 persen. Kondisi ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang akuntabel, efisien, dan terkendali, serta menunjukkan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

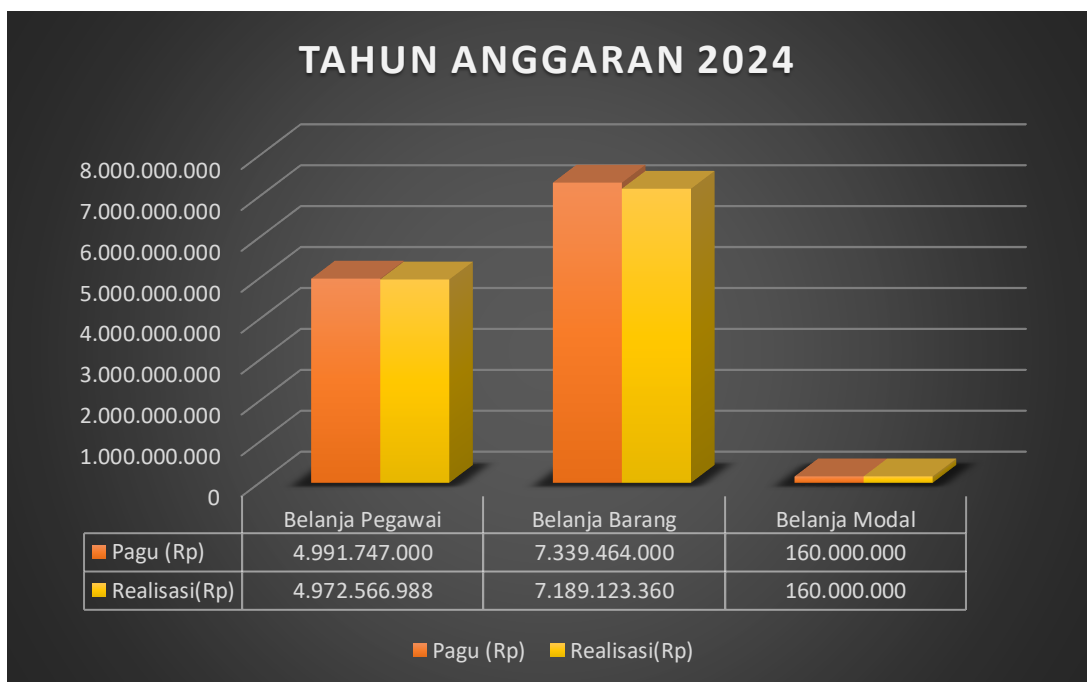
Secara komparatif, Belanja Pegawai menjadi komponen dengan porsi terbesar dalam struktur anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, yaitu sekitar 61,51 persen dari total pagu. Tingkat realisasi yang mencapai 99,99 persen menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan pegawai telah disusun secara realistis dan pelaksanaannya berjalan stabil sepanjang tahun anggaran. Hal ini juga mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan pembayaran gaji, tunjangan, dan hak pegawai lainnya tanpa menimbulkan deviasi yang signifikan.

Belanja Barang menempati porsi sekitar 37,68 persen dari total pagu dan memiliki tingkat realisasi 99,98 persen. Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan belanja pegawai dan belanja modal, capaian ini tetap menunjukkan pengelolaan yang sangat baik. Perbedaan kecil tersebut lebih disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, optimalisasi biaya operasional, serta penyesuaian kebutuhan riil pada tahap akhir pelaksanaan kegiatan, tanpa memengaruhi pencapaian output dan sasaran kinerja.

Sementara itu, Belanja Modal memiliki porsi relatif kecil, yaitu sekitar 0,81 persen dari total pagu, namun menunjukkan tingkat realisasi yang sangat tinggi, yakni 99,99 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pengadaan aset pendukung telah direncanakan secara matang, dilaksanakan tepat waktu, dan sesuai

dengan kebutuhan organisasi, sehingga tidak menimbulkan sisa anggaran yang signifikan.

Secara keseluruhan, perbandingan antar jenis belanja menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar telah dilakukan secara proporsional dan seimbang, dengan dominasi belanja pegawai yang wajar untuk satuan kerja berbasis fungsi penelitian dan pengembangan, serta dukungan belanja barang dan belanja modal yang efektif dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi.



**Gambar 3.23** Pagu Realisasi berdasarkan Jenis Belanja

Secara umum, Tahun Anggaran 2024 mengelola pagu anggaran yang lebih besar dibandingkan Tahun Anggaran 2025. Pada tahun 2024, total pagu anggaran sebesar Rp12.490.619.000,- dengan realisasi Rp12.321.690.348,- atau 98,65%, sehingga masih terdapat sisa pagu sebesar Rp168.928.652,-. Sementara itu, pada tahun 2025, total pagu anggaran sebesar Rp9.001.912.000,- dengan realisasi Rp9.001.110.350,- atau 99,99%, dan sisa pagu sangat minimal sebesar Rp801.650,-. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam efektivitas dan presisi penyerapan anggaran pada tahun 2025.

Pada Tahun Anggaran 2024, Belanja Pegawai memiliki pagu sebesar Rp4.991.747.000,- dengan realisasi Rp4.972.566.988,- atau 99,62%, sehingga terdapat sisa pagu Rp18.588.012. Pada Tahun Anggaran 2025, pagu Belanja Pegawai meningkat menjadi Rp5.536.935.000,- dengan realisasi Rp5.536.762.021,- atau 99,99%, dan sisa pagu hanya Rp172.979,-. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan Belanja Pegawai yang semakin akurat dan terkendali pada tahun 2025.

Pada Tahun Anggaran 2024, Belanja Barang memiliki pagu Rp7.339.464.000,- dengan realisasi Rp7.189.123.360,- atau 97,95%, dan sisa pagu relatif besar yaitu Rp150.340.640,-. Sebaliknya, pada Tahun Anggaran 2025, pagu Belanja Barang sebesar Rp3.392.277.000,- dengan realisasi Rp3.391.648.452,- atau 99,98%, dan sisa pagu hanya Rp628.548,-. Hal ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan belanja barang pada tahun 2025.

Pada Tahun Anggaran 2024, Belanja Modal memiliki pagu Rp160.000.000,- dan terealisasi 100%, tanpa sisa anggaran. Pada Tahun Anggaran 2025, pagu Belanja Modal sebesar Rp72.700.000,- dengan realisasi Rp72.699.877,- atau 99,99%, dan sisa pagu sangat kecil yaitu Rp123,-. Kedua tahun menunjukkan pengelolaan Belanja Modal yang sangat baik, dengan tingkat penyerapan mendekati sempurna.

Secara komparatif, meskipun Tahun Anggaran 2024 mengelola pagu yang lebih besar, namun Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang lebih optimal, baik dari sisi persentase realisasi maupun minimalisasi sisa pagu pada seluruh jenis

belanja. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, serta efektivitas pengendalian anggaran, yang sejalan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka SAKIP.

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Triwulan IV berdasarkan Fungsi**  
**Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar**  
**Tahun Anggaran 2025**

No	Fungsi	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Fungsi Agama	8.913.623.000	8.912.828.280	99,99
2	Fungsi Pendidikan	88.289.000	88.282.070	99,99
<b>TOTAL</b>		<b>9.001.912.000</b>	<b>9.001.110.350</b>	<b>99,99</b>

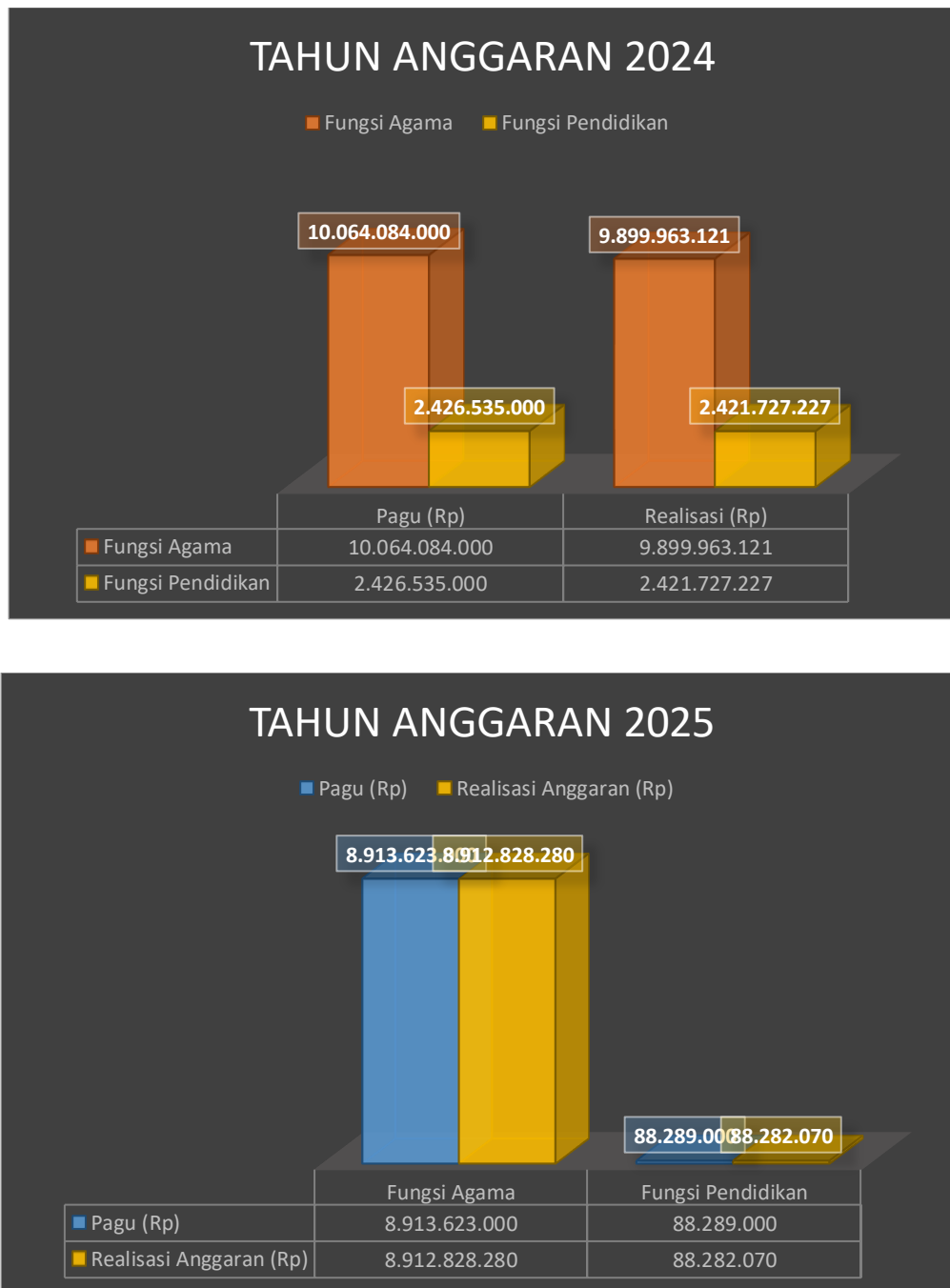
Pagu anggaran pada Fungsi Agama sebesar Rp8.913.623.000,- dengan realisasi Rp8.912.828.280,- atau 99,99%. Capaian ini mencerminkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada fungsi utama instansi, di mana seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana tanpa hambatan signifikan. Sisa anggaran yang sangat minimal menunjukkan ketepatan perencanaan kebutuhan serta efektivitas pengendalian pelaksanaan anggaran sepanjang tahun berjalan.

Pada Fungsi Pendidikan, pagu anggaran sebesar Rp88.289.000,- dengan realisasi Rp88.282.070,- atau 99,99%. Meskipun secara nominal pagu relatif kecil dibandingkan Fungsi Agama, tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan telah direncanakan dan dilaksanakan secara tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, kinerja anggaran Tahun Anggaran 2025 menunjukkan konsistensi capaian realisasi yang sangat tinggi pada seluruh fungsi, tanpa adanya deviasi signifikan antara pagu dan realisasi. Kondisi ini mengindikasikan semakin matangnya proses perencanaan berbasis kebutuhan riil, peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan, serta penguatan mekanisme pengendalian dan

monitoring anggaran.

Dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,99%, pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025 dapat dinilai sangat efektif dan efisien, serta telah memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja dan tata kelola anggaran yang baik. Capaian ini menjadi indikator positif dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi dan memperkuat implementasi SAKIP pada tahun berjalan.



**Gambar 3.24** Pagu Realisasi berdasarkan Fungsi

Pada Tahun Anggaran 2025, Fungsi Agama memiliki pagu anggaran sebesar Rp8.913.623.000,- dengan realisasi Rp8.912.828.280,- atau 99,99%. Pada Tahun Anggaran 2024, pagu Fungsi Agama sebesar Rp10.064.084.000 dengan realisasi Rp9.899.963.121. Dengan demikian, meskipun terjadi penurunan pagu Fungsi Agama pada Tahun 2025, namun tingkat efektivitas realisasi anggarannya meningkat, ditunjukkan dengan capaian realisasi yang hampir sempurna.

Pada Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp88.289.000,- dengan realisasi Rp88.282.070,- atau 99,99%. Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2024, pagu Fungsi Pendidikan sebesar Rp2.426.535.000,- dengan realisasi Rp2.421.727.227,-. Terjadi penurunan signifikan pagu Fungsi Pendidikan pada Tahun 2025, namun pelaksanaan anggarannya tetap menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi dan efisien.

Secara komparatif, Tahun Anggaran 2025 menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dibandingkan Tahun Anggaran 2024, khususnya dari sisi ketepatan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Penurunan pagu pada kedua fungsi tidak berdampak pada kinerja penyerapan, yang justru mengalami perbaikan hingga mencapai 99,99%.

Kondisi ini mengindikasikan adanya penguatan dalam proses perencanaan berbasis kebutuhan riil, pengendalian pelaksanaan anggaran yang lebih ketat, serta peningkatan akurasi penjadwalan kegiatan, sehingga realisasi anggaran dapat lebih mendekati pagu yang ditetapkan dan mendukung pencapaian sasaran kinerja secara optimal.

Dengan demikian, meskipun Tahun Anggaran 2024 mengelola pagu yang lebih besar, namun Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, baik secara agregat maupun berdasarkan fungsi. Hal ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola anggaran yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja dan penguatan implementasi SAKIP.

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Triwulan IV berdasarkan Kegiatan**  
**Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar**  
**Tahun Anggaran 2025**

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	7895 Kajian Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Agama	512.980.000	512.951.356	99,99
2	2153 Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	863.543.000	863.439.304	99,98
4	2154 Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	108.664.000	108.655.060	99,99
5	2156 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	7.428.436.000	7.427.782.560	99,99
6	5311 Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	88.289.000	88.282.070	99,99
<b>TOTAL</b>		<b>9.001.912.000</b>	<b>9.001.110.350</b>	<b>99,99</b>

Kegiatan 7895, Kajian Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Agama memiliki pagu anggaran sebesar Rp512.980.000 dengan realisasi Rp512.951.356 atau 99,99%. Tingginya tingkat penyerapan anggaran menunjukkan bahwa seluruh rangkaian kajian kebijakan strategis dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dan jadwal yang ditetapkan, serta mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan bidang agama secara optimal.

Kegiatan 2153, Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Pagu anggarannya sebesar Rp863.543.000 dengan realisasi Rp863.439.304 atau 99,98%. Capaian ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang efektif, dengan sisa anggaran yang sangat kecil sebagai hasil efisiensi pelaksanaan tanpa mengurangi kualitas output dan capaian

sasaran kegiatan.

Kegiatan 2154, Penelitian dan Pengembangan Lektor, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen memiliki pagu anggaran sebesar Rp108.664.000 dengan realisasi Rp108.655.060 atau 99,99%. Tingkat penyerapan yang hampir sempurna mencerminkan ketepatan perencanaan kebutuhan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang lektor dan khazanah keagamaan.

Kegiatan 2156, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya memiliki pagu anggaran terbesar, yaitu Rp7.428.436.000, dengan realisasi Rp7.427.782.560 atau 99,99%. Tingginya capaian realisasi pada kegiatan ini menunjukkan peran dukungan manajemen yang sangat efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan seluruh program dan kegiatan teknis, serta memastikan tata kelola organisasi berjalan secara efisien dan akuntabel.

Kegiatan 5311, Penelitian dan Pengembangan Lektor dan Khazanah Pendidikan memiliki pagu anggaran sebesar Rp88.289.000 dengan realisasi Rp88.282.070 atau 99,99%. Meskipun pagu relatif kecil, tingkat penyerapan yang sangat tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan tepat sasaran dan mendukung pencapaian tujuan penelitian di bidang pendidikan keagamaan.

Secara keseluruhan, seluruh kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang sangat optimal, dengan persentase realisasi berada pada kisaran 99,98%–99,99%. Tidak terdapat kegiatan dengan deviasi anggaran signifikan, yang menandakan semakin matangnya proses perencanaan berbasis kebutuhan riil, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian anggaran yang konsisten sepanjang tahun berjalan.

Dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,99%, pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kegiatan dapat dinilai sangat efektif dan efisien, serta telah mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi secara optimal. Capaian ini sekaligus mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola anggaran dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan prinsip SAKIP.



**Gambar 3.25** Pagu dan Realisasi berdasarkan Kegiatan

Jika diperbandingkan dengan tahun 2024 pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (2153), kinerja penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2024 telah menunjukkan capaian yang sangat baik dengan realisasi sebesar 99,97%. Pada Tahun Anggaran 2025 capaian tersebut kembali dipertahankan bahkan mengalami peningkatan menjadi 99,98%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan kegiatan, penjadwalan pelaksanaan, serta pengendalian penggunaan anggaran telah berjalan semakin akurat dan stabil dari tahun sebelumnya.

Pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lektor, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi (2154) terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi anggaran hanya mencapai 88,01% dengan sisa anggaran yang relatif besar, sehingga

menjadi faktor utama yang menurunkan tingkat penyerapan anggaran secara keseluruhan. Namun pada Tahun Anggaran 2025 capaian realisasi meningkat sangat drastis hingga mencapai 99,99%. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan substansial pada tahap perencanaan kegiatan, penentuan kebutuhan biaya, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan (2155), Tahun Anggaran 2024 telah mencapai realisasi sebesar 99,72%. Pada Tahun Anggaran 2025 tingkat penyerapan anggaran meningkat menjadi 99,99%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan serta pengaturan jadwal kegiatan menjadi lebih tertata sehingga deviasi anggaran semakin kecil.

Pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (2156), yang merupakan porsi anggaran terbesar, realisasi pada Tahun Anggaran 2024 mencapai 99,52% dengan sisa anggaran yang masih cukup terlihat. Pada Tahun Anggaran 2025 realisasi meningkat menjadi 99,99%. Karena kegiatan ini memiliki kontribusi anggaran terbesar, peningkatan presisi realisasi pada kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap meningkatnya capaian penyerapan anggaran secara keseluruhan.

Selanjutnya pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan (5311), baik pada Tahun Anggaran 2024 maupun Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang konsisten sangat baik, dengan realisasi mencapai 99,99%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut telah memiliki pola perencanaan dan pelaksanaan yang stabil serta dapat diprediksi secara akurat.

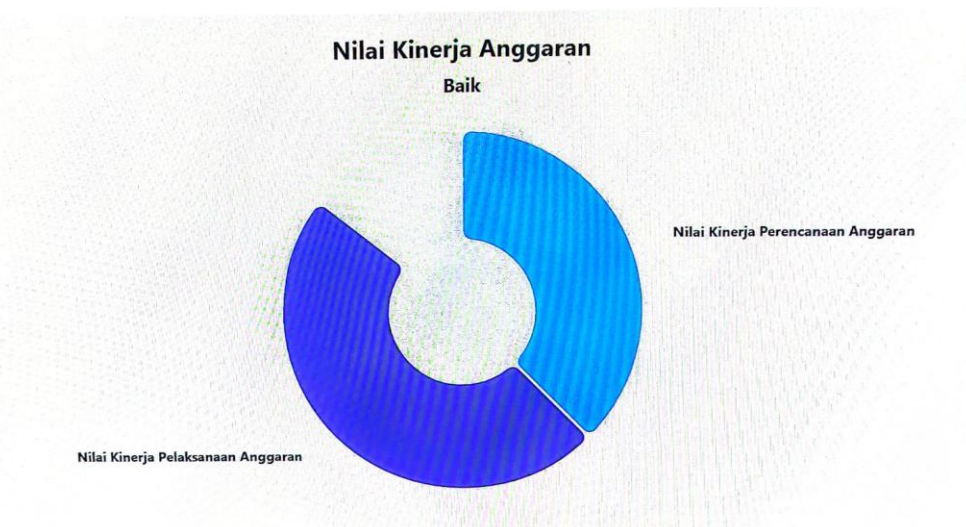
Adapun pada Tahun Anggaran 2025 terdapat kegiatan baru yaitu Kajian Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Agama (7895) yang sebelumnya belum ada pada Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini memiliki tingkat realisasi sebesar 99,99%, yang menunjukkan bahwa meskipun merupakan kegiatan baru, proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaannya telah dipersiapkan dengan baik sehingga tidak menimbulkan deviasi anggaran yang berarti. Kehadiran kegiatan ini juga memperkuat fungsi perumusan rekomendasi

kebijakan berbasis kajian dan penelitian serta menambah kontribusi terhadap capaian kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, perbandingan per kegiatan menunjukkan bahwa Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun perbaikan pengelolaan anggaran, di mana hampir seluruh kegiatan mengalami peningkatan ketepatan realisasi anggaran. Tidak terdapat lagi kegiatan dengan tingkat serapan rendah sebagaimana terjadi pada Tahun Anggaran 2024, sehingga kualitas tata kelola perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

## 2. Nilai Kinerja Anggaran (SMART DJA)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja penganggaran, evaluasi dilakukan melalui dua komponen utama yaitu kinerja perencanaan anggaran dan kinerja pelaksanaan anggaran. Kedua komponen tersebut merupakan pembentuk utama Nilai Kinerja Anggaran yang menggambarkan kualitas pengelolaan anggaran secara menyeluruh. Pada Tahun Anggaran 2024 maupun Tahun Anggaran 2025, pengelolaan anggaran memperoleh predikat “Baik”. Meskipun kedua tahun menunjukkan kategori yang sama, komposisi pembentuk nilai memperlihatkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025.



**Gambar 3.26** Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024, nilai kinerja anggaran masih lebih banyak ditopang oleh aspek pelaksanaan anggaran. Realisasi anggaran mencapai 98,65% yang menunjukkan bahwa program dan kegiatan pada umumnya telah terlaksana dan output kegiatan dapat dicapai.

Namun demikian, kualitas perencanaan anggaran belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat pada nilai kinerja perencanaan anggaran 2024, di mana komponen efektivitas (CRO/capaian RO) memperoleh nilai maksimal, sedangkan komponen penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan efisiensi SBK belum memberikan kontribusi nilai karena pemetaan SBK belum sepenuhnya tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah mampu menghasilkan keluaran kegiatan, tetapi belum sepenuhnya berbasis efisiensi biaya.

Sementara itu, pada kinerja pelaksanaan anggaran 2024, indikator capaian output dan penyerapan anggaran memberikan kontribusi nilai terbesar. Hal ini menunjukkan kegiatan telah dilaksanakan dan target keluaran tercapai. Namun beberapa indikator administratif, seperti deviasi halaman III DIPA, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, serta revisi anggaran masih menunjukkan adanya ketidaktepatan waktu dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan baik, tetapi perencanaan dan pengendalian pelaksanaannya belum sepenuhnya presisi, sehingga masih terdapat sisa anggaran dan deviasi antara rencana dan realisasi.

Pada Tahun Anggaran 2025, terjadi peningkatan kualitas pengelolaan anggaran yang cukup signifikan. Realisasi anggaran mencapai 99,99% dengan sisa anggaran yang sangat minimal. Capaian tersebut tidak hanya menunjukkan keberhasilan pelaksanaan anggaran, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas perencanaan. Pada aspek kinerja perencanaan anggaran 2025, efektivitas tetap tinggi dan mulai diikuti kontribusi penggunaan SBK, yang menandakan perencanaan anggaran telah semakin berbasis standar biaya serta mempertimbangkan efisiensi. Perencanaan kegiatan juga lebih akurat dalam memperkirakan kebutuhan biaya, waktu pelaksanaan, dan volume kegiatan.

Pada sisi kinerja pelaksanaan anggaran 2025, indikator penyerapan anggaran dan capaian output tetap tinggi serta lebih stabil. Indikator lain seperti deviasi halaman III DIPA, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, dan revisi anggaran menunjukkan pengendalian yang lebih tertib dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan

bahwa monitoring pelaksanaan kegiatan berjalan lebih efektif, ketepatan waktu pembayaran semakin baik, serta kebutuhan revisi anggaran semakin berkurang.

Apabila dibandingkan, Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa nilai kinerja anggaran masih berorientasi pada keberhasilan penyerapan anggaran dan pencapaian output kegiatan. Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2025 nilai kinerja anggaran tidak hanya didukung oleh tingginya realisasi belanja, tetapi juga oleh kualitas perencanaan yang semakin tepat dan terukur. Dengan kata lain, terjadi peningkatan keselarasan antara tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan anggaran.

Dengan demikian, meskipun kedua tahun sama-sama memperoleh predikat “Baik”, kualitas Nilai Kinerja Anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dapat dinilai lebih matang dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Tahun 2025 menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola penganggaran, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian anggaran, sehingga dukungan anggaran terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah mengalami perbaikan berkelanjutan dari Tahun Anggaran 2024 ke Tahun Anggaran 2025. Peningkatan tidak hanya tercermin pada tingginya realisasi anggaran, tetapi juga pada semakin baiknya kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, serta efektivitas pengendalian anggaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses penganggaran berbasis kinerja telah berjalan lebih matang, di mana keterkaitan antara perencanaan program, pengalokasian anggaran, dan pencapaian output semakin selaras. Dengan demikian, pengelolaan anggaran telah mampu memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi sekaligus memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan transparan.

### **3. Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Efisiensi sumber daya diukur melalui kemampuan organisasi dalam memanfaatkan alokasi anggaran secara optimal untuk

menghasilkan keluaran (output) kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan. Efisiensi tidak hanya dilihat dari tingginya tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kesesuaian antara kebutuhan riil kegiatan dengan besaran biaya yang digunakan, serta minimnya deviasi antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2024, realisasi anggaran mencapai 98,65% dengan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp168.928.652. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah terlaksana, namun masih terdapat ketidaktepatan dalam perencanaan kebutuhan biaya dan waktu pelaksanaan kegiatan. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan yang tidak terserap secara optimal dan masih terjadinya penyesuaian pelaksanaan kegiatan di akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran telah efektif dalam menghasilkan output, tetapi tingkat efisiensinya belum sepenuhnya optimal karena perencanaan kebutuhan biaya belum sepenuhnya presisi.

Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran meningkat menjadi 99,99% dengan sisa anggaran yang sangat minimal. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Perencanaan kegiatan telah semakin berbasis kebutuhan riil, volume kegiatan lebih terukur, dan penjadwalan pelaksanaan lebih terkendali. Penggunaan anggaran mampu menghasilkan keluaran kegiatan tanpa memerlukan penambahan biaya maupun perubahan signifikan terhadap rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu, penerapan standar biaya serta pengendalian pelaksanaan anggaran yang lebih baik turut mendukung peningkatan efisiensi. Monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan secara lebih intensif sehingga potensi pemborosan anggaran dapat diminimalkan. Kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan semakin tinggi, revisi anggaran dapat ditekan, serta penyelesaian administrasi pembayaran lebih tepat waktu.

Dengan demikian, jika dibandingkan antara kedua tahun tersebut, efisiensi sumber daya pada Tahun Anggaran 2025 lebih baik dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2024 anggaran telah mampu menghasilkan output kegiatan, namun masih terdapat ruang

perbaikan dalam ketepatan perencanaan biaya. Sementara pada tahun 2025, penggunaan anggaran telah menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi karena setiap alokasi biaya lebih sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, efisiensi anggaran menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada optimalisasi penggunaan sumber daya untuk menghasilkan kinerja. Hal ini menandakan semakin kuatnya penerapan prinsip value for money, yaitu ekonomi dalam perencanaan biaya, efisiensi dalam penggunaan anggaran, dan efektivitas dalam pencapaian keluaran kegiatan, sehingga dukungan anggaran terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi menjadi semakin optimal.

### **C. Capaian Kinerja Lainnya**

Selain capaian kinerja yang diukur melalui indikator utama, efisiensi anggaran, serta nilai kinerja anggaran, terdapat pula capaian kinerja lainnya yang menunjukkan kontribusi organisasi dalam memperluas manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Capaian ini terutama tercermin melalui penguatan jejaring kerja sama, peningkatan kualitas substansi kebijakan, serta perluasan dampak program kepada masyarakat.

Salah satu capaian penting pada Tahun Anggaran 2025 adalah terjalinnya kerja sama formal antara satuan kerja dengan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama dengan Pemerintah Kota Palu mengenai pengukuran indeks kerukunan umat beragama dan penguatan moderasi beragama. Melalui kerja sama ini, hasil kajian tidak hanya menjadi dokumen internal, tetapi secara langsung dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tingkat daerah.

Kerja sama ini merupakan program yang berkelanjutan dan bukan kegiatan yang bersifat insidental. Pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun kedua implementasi kegiatan pengukuran kerukunan umat beragama, setelah sebelumnya telah dilaksanakan

kerja sama serupa dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan pengukuran indeks kerukunan umat beragama.



**Gambar 3.27** Infografis Hasil Pengukuran IKUB Kab. Luwu Timur

Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan pemerintah daerah terhadap kapasitas organisasi sebagai mitra strategis dalam penyediaan data dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Ruang lingkup kerja sama meliputi pelaksanaan pengukuran kerukunan umat beragama, pelatihan dan pendampingan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi, hingga diseminasi hasil pengkajian kepada masyarakat. Dengan demikian, organisasi tidak hanya berperan sebagai pelaksana pengkajian, tetapi juga sebagai mitra kebijakan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.



**Gambar 3.28** Infografis Hasil Pengukuran IKUB Kota Palu

Selain dengan pemerintah daerah, pada Tahun Anggaran 2025 juga dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi melalui Nota Kesepahaman antara Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dengan Institut Agama Islam (IAI) DDI Sidenreng Rappang. Kerja sama ini bertujuan memperkuat hubungan kelembagaan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi sarasehan, pelatihan moderasi beragama, publikasi ilmiah, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

INDEKS KUB

KAB. LUWU TIMUR  
&  
KOTA PALU



**Gambar 3.29** Infografis Kegiatan Kerjasama

Kolaborasi dengan perguruan tinggi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas metodologi pengkajian, penguatan validitas hasil kajian, serta perluasan diseminasi hasil pengkajian kepada komunitas akademik. Selain itu, keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penguatan moderasi beragama juga memperluas jangkauan program hingga ke masyarakat pendidikan.

Kerja sama yang terbangun dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi juga berkontribusi pada penguatan moderasi beragama di masyarakat. Melalui sosialisasi, pembinaan, pelatihan, serta kegiatan edukatif lainnya, pemahaman keagamaan yang moderat

semakin meningkat dan mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif serta menjaga kerukunan umat beragama.

Di sisi tata kelola organisasi, kolaborasi lintas instansi memperbaiki koordinasi pelaksanaan kegiatan, mempermudah akses data lapangan, serta mempercepat proses diseminasi hasil pengkajian. Hal ini turut meningkatkan kualitas perencanaan program karena kebutuhan riil masyarakat dapat diidentifikasi lebih akurat. Selain itu, keterlibatan pegawai dalam kegiatan kolaboratif juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kemampuan analisis kebijakan, serta profesionalitas pelaksanaan tugas.

Secara keseluruhan, capaian kinerja lainnya menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya berfokus pada pemenuhan indikator kinerja formal, tetapi juga berhasil memperluas dampak program melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Melalui kerja sama berkelanjutan tersebut, fungsi organisasi sebagai pusat kajian dan pengembangan kebijakan pembangunan bidang agama semakin kuat, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi penguatan kerukunan umat beragama dan moderasi beragama di daerah.

Selain capaian yang diperoleh melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi, organisasi juga memperoleh capaian penting pada aspek tata kelola keuangan negara. Pada Tahun Anggaran 2025, satuan kerja memperoleh penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II berupa Peringkat Pertama Kategori Penyelesaian Rekonsiliasi Keuangan Tercepat lingkup wilayah kerja KPPN Makassar II periode Semester I Tahun 2025.

Penghargaan tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan, khususnya proses rekonsiliasi laporan keuangan, telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan perbendaharaan negara. Rekonsiliasi keuangan merupakan tahapan penting dalam pengelolaan keuangan negara karena berkaitan langsung dengan akurasi data realisasi anggaran, kesesuaian pencatatan transaksi, serta validitas laporan keuangan satuan kerja. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian rekonsiliasi menunjukkan kualitas pengendalian internal yang baik serta koordinasi yang efektif

antara pengelola keuangan, operator aplikasi, dan pejabat penandatanganan laporan.

Capaian ini sekaligus memperkuat hasil evaluasi sebelumnya bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan belanja, tetapi juga pada kualitas tata kelola keuangan. Ketepatan penyusunan laporan keuangan, kesesuaian data antara sistem akuntansi instansi dan sistem perbendaharaan negara, serta kepatuhan terhadap jadwal pelaporan menunjukkan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Penghargaan tersebut juga menjadi indikator bahwa mekanisme pengendalian intern, monitoring realisasi anggaran, serta penyelesaian administrasi pembayaran telah berjalan secara sistematis. Hal ini sejalan dengan peningkatan nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya ditunjukkan melalui indikator penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, dan ketertiban pelaporan.

Dengan demikian, capaian pada aspek kerja sama kelembagaan, penguatan moderasi beragama, pengembangan jejaring akademik, serta penghargaan pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa kinerja organisasi tidak hanya diukur dari pencapaian indikator program, tetapi juga dari kualitas tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas keuangan. Capaian-capaian tersebut semakin memperkuat posisi organisasi sebagai unit kerja yang profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama di bidang pembangunan agama dan penguatan moderasi beragama.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Analisis Capaian Sasaran Kinerja**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar secara umum telah berjalan sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama.

Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan ketercapaian indikator kinerja, kualitas keluaran kegiatan, nilai kinerja anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kontribusi program terhadap penguatan moderasi beragama dan pembangunan bidang agama. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, capaian sasaran kinerja diklasifikasikan sebagai berikut:

##### **1. Capaian Kinerja Sangat Baik**

Sebagian besar sasaran kinerja berada pada kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh tercapainya target indikator kinerja berupa tersusunnya naskah pengkajian kebijakan pembangunan bidang agama, pelaksanaan kegiatan penguatan moderasi beragama, serta kegiatan diseminasi hasil kajian kepada pemangku kepentingan.

Sebagaimana diuraikan pada Bab III, keluaran kegiatan telah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan kebijakan dan informasi strategis bagi pemangku kepentingan, sehingga fungsi organisasi sebagai *policy support* dan *knowledge provider* dalam pembangunan bidang agama dapat berjalan secara optimal.

Dari aspek pengelolaan anggaran, tingkat realisasi anggaran mencapai 99,99% dengan deviasi yang sangat kecil. Nilai Kinerja Anggaran berada pada kategori baik yang mencerminkan keselarasan antara kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja telah berjalan efektif serta mampu mendukung pencapaian sasaran program.

Efisiensi penggunaan sumber daya juga menunjukkan kondisi sangat baik. Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal tanpa revisi anggaran yang signifikan, serta menghasilkan keluaran kegiatan sesuai target. Perencanaan kegiatan semakin berbasis kebutuhan riil dan pengendalian pelaksanaan anggaran semakin tertib.

Capaian kinerja sangat baik juga diperkuat oleh capaian kinerja lainnya, antara lain:

- 1) Kerja sama berkelanjutan dengan pemerintah daerah dalam pengukuran kerukunan umat beragama;
- 2) Kerja sama dengan perguruan tinggi dalam penguatan moderasi beragama dan pengembangan pengkajian kebijakan;
- 3) Penghargaan pengelolaan keuangan dari KPPN atas ketepatan dan ketertiban pelaporan keuangan.

Dengan demikian, sasaran kinerja pada kategori ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya memenuhi target output, tetapi juga mendukung prioritas nasional penguatan moderasi beragama.

## **2. Capaian Kinerja Cukup**

Sebagian kecil sasaran kinerja berada pada kategori cukup. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan hasil pengkajian kebijakan yang belum sepenuhnya dapat diukur pada tahun berjalan. Meskipun naskah pengkajian telah tersusun dan diseminasi telah dilakukan, implementasi rekomendasi kebijakan oleh pemangku kepentingan memerlukan proses koordinasi lintas sektor dan waktu yang lebih panjang.

Sebagaimana diuraikan pada Bab III, sebagian indikator kinerja masih berorientasi pada keluaran (output), sedangkan pengukuran manfaat (outcome) bersifat jangka menengah. Oleh karena itu, dampak kebijakan belum sepenuhnya dapat terlihat dalam periode pelaporan.

Kategori cukup tersebut tidak menunjukkan kegagalan pelaksanaan kegiatan, melainkan menunjukkan bahwa manfaat kebijakan memerlukan waktu untuk terimplementasi dan terukur.

### **3. Capaian Kinerja Kurang**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada Bab III, tidak terdapat sasaran kinerja yang masuk dalam kategori kurang. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja dan target keluaran tercapai. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan pada aspek pengukuran dampak program, penguatan indikator outcome, serta publikasi hasil kajian agar pemanfaatannya semakin luas.

## **B. Rekomendasi Perbaikan Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja, diperlukan beberapa langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya:

### **1. Penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran**

Penyusunan rencana kegiatan perlu semakin berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat serta memperkuat keterkaitan antara sasaran, indikator kinerja, dan alokasi anggaran agar prinsip penganggaran berbasis kinerja semakin optimal.

### **2. Penguatan indikator kinerja berbasis outcome**

Indikator kinerja diarahkan tidak hanya pada keluaran kegiatan, tetapi pada manfaat kebijakan, khususnya pemanfaatan hasil pengkajian dalam perumusan kebijakan pembangunan bidang agama dan penguatan moderasi beragama.

### **3. Optimalisasi pemanfaatan hasil pengkajian**

Hasil kajian perlu ditindaklanjuti melalui forum koordinasi kebijakan, diseminasi tematik, policy brief, dan publikasi ilmiah agar rekomendasi kebijakan dapat diimplementasikan oleh pemangku kepentingan.

### **4. Perluasan kerja sama kelembagaan**

Kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga terkait perlu diperluas untuk meningkatkan kualitas data, validitas pengkajian, serta dampak program kepada masyarakat.

### **5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia**

Pengembangan kompetensi pegawai perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan metodologi pengkajian kebijakan, analisis kebijakan publik, serta penguatan moderasi beragama.

## **6. Penguatan pengendalian internal dan akuntabilitas keuangan**

Monitoring pelaksanaan anggaran, ketepatan penyelesaian administrasi keuangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan negara perlu terus ditingkatkan guna menjaga kualitas akuntabilitas kinerja.

**Secara keseluruhan**, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik dan menunjukkan peningkatan kualitas dibandingkan tahun sebelumnya. Pengelolaan kinerja dan anggaran semakin efektif, efisien, dan akuntabel serta mampu mendukung peran organisasi dalam penguatan moderasi beragama dan pembangunan bidang agama.

Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi serta menghadapi berbagai dinamika pelaksanaan program pada Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Laporan Kinerja ini juga merupakan refleksi pelaksanaan Rencana Strategis serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian sasaran Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama.

Demikian Laporan Kinerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 ini disusun dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada organisasi, serta menjadi salah satu acuan dalam proses perencanaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program pada tahun berikutnya sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridhai segala ikhtiar dan pengabdian kita dalam mewujudkan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat dan pembangunan bidang agama.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA

# PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sapriah  
Jabatan : Kepala Balai Litbang Agama Makassar  
Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suyitno  
Jabatan : Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama.

Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama melakukan penyerapan anggaran sampai pada bulan ke 7 (tujuh) dengan target senilai 70% (porsen).

Jakarta, 28 Desember 2024  
Pihak Kedua  
Suyitno

Jakarta, 28 Desember 2024  
Pihak Pertama  
Sapriah

Program dan Kegiatan	Anggaran
1 Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	Rp. 1.486.542.000,-
2 Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	Rp. 1.066.045.000,-
3 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Rp. 1.658.969.000,-
4 Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Rp. 767.566.000,-
5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	Rp. 7.529.497.000,-
<b>Jumlah seluruh</b>	<b>Rp. 12.490.619.000,-</b>

Jakarta, 28 Desember 2024  
Kepala Balai Litbang Agama Makassar.

Sapriah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR  
BADAN MODERASI BERAGAMA DAN PENGEMBANGAN SDM (BMBPDSM)**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan	Jumlah penelitian yang menghasilkan rasah kebijakan Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan (policy paper) / Policy Paper bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengajian Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengajian Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan yang layak diajukan memperoleh HAKI	3 100,00% 1
2	Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan	Jumlah penelitian yang menghasilkan rasah kebijakan Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang menghasilkan kebijakan (policy paper) / Policy Paper Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang menghasilkan kebijakan Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengajian Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Jumlah produk hasil penelitian, pengembangan, dan pengajian Bidang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi yang layak diajukan memperoleh HAKI	3 100,00% 1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
3	Meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan	Jumlah penelitian yang menghasilkan rasah kebijakan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan (policy paper) / Policy Paper Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengajian Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan	2 100,00%
4	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan Bidang Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Jumlah penelitian Bidang Lektur, Khazanah Pendidikan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan (policy paper) / Policy Paper Bidang Lektur, Khazanah Pendidikan Keagamaan yang menghasilkan kebijakan Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengajian Bidang Lektur, Khazanah Pendidikan Keagamaan	1 100,00%
5	Meningkatnya kualitas dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan anggaran sesuai Rencana	Persentase keelaksanaan perencanaan program dan anggaran sesuai Rencana Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran sesuai standar	4 100,00%
6	Meningkatnya kinerja pelaksanaan anggaran	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	90,00%
7	Meningkatnya aset yang divestasi/dihasilkan BMB	Persentase aset yang divestasi/dihasilkan BMB	100,00%
8	Meningkatnya jenis layanan publik yang sesuai dengan SOP dan mempercepat layanan	Persentase jenis layanan publik yang sesuai SOP	100,00%
9	Meningkatnya ASN yang profesional	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesionalitas kategori tinggi (minimum 81) Persentase ketidakhadiran level kompetensi yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	97,00% 90,00%

Nilai Kinerja Anggaran : 95



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suprihah  
Jabatan : Kepala Balai Litbang Agama Makassar  
Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suyitno  
Jabatan : Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM



selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 28 Desember 2024



Pihak Kedua,  Pihak Pertama, 

Program dan Kegiatan	Anggaran
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
1. Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	Rp. 2.962.164.000,-
2. Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	Rp. 1.180.000.000,-
3. Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Rp. 300.000.000,-
4. Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Dikti	Rp. 7.191.187.000,-
<b>Jumlah seluruh</b>	<b>Rp. 11.633.351.000,-</b>

Jakarta, 28 Desember 2024

Kepala BMBPSCM,  Kepala Balai Litbang Agama Makassar, 

Lampiran Perjanjian Kinerja  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pengabdian ASN (pengabdian, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Indeks Profesionalisme ASN	77,10
		Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengabdian SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	51,00
		Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai laladan/lokal	3,00
		Nilai kepuasan layanan kepegawaian	76,70
2	Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan dan pelaksanaan anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94,25
		Persentase satuan kerja yang menyusun Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	100,00
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBUN sesuai standar dan tepat waktu	75,00
3	Meningkatnya kualitas pemenuhan Reformasi Birokrasi	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	60,00
4	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar	100,00
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	91,00
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan	Persentase Digitalisasi Arip dan mudah diakses	15,00

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5	Perputakaan, tata perurutan, arsip dan layanan pengabdian barang jasa	Persentase koleksi digital perputakaan yang dapat diakses secara online	15,00
		Nilai Akreditasi Perputakaan	8
6	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen	100,00
		Persentase layanan keagamaan dan pendidikan berbasis IT	100,00
7	Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan agama dan penguatan moderasi beragama	Persentase Naskah kebijakan Pembangunan Agama yang diamanatkan	91,00
		Tingkat Moderasi Beragama pada Touch Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	76,00
		Nilai Evaluasi Program Penguatan Moderasi Beragama	76,00
8	Meningkatnya kualitas dan kebermampuan naskah kebijakan, Layanan Lektor dan Literasi Keagamaan	Persentase Naskah kebijakan Lektor dan Literasi Keagamaan yang diamanatkan	91,00

Nilai Kerja Anggaran : 83



# PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sapritah  
Jabatan : Kepala Balai Litbang Agama Makassar Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Ali Ramdhani  
Jabatan : Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 September 2025  
Pihak Pertama,

Sapritah

Muhammad Ali Ramdhani

Program dan Anggaran	Anggaran
<b>Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama</b>	Rp. 3.104.042.000
1 Kajian Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Agama	Rp. 3.104.042.000
<b>Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran</b>	Rp. 211.711.000
1 Kajian Kebijakan Strategis Pendidikan Agama dan Keagamaan	Rp. 211.711.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Rp. 8.251.741.000
1 Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan	Rp. 863.601.000
2 Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	Rp. 108.664.000
3 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM	Rp. 7.191.187.000
4 Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Rp. 88.280.000
<b>Jumlah Seluruh</b>	<b>Rp. 11.567.494.000</b>

Jakarta, 30 September 2025  
Kepala Balai Litbang Agama Makassar,

Muhammad Ali Ramdhani  
Sapritah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pengembangan bidang agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perentase Naskah kebijakan Pembangunan Bidang Agama yang dihasilkan</li> <li>Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>91,00</li> <li>76,00</li> </ul>
2	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan</li> <li>Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>91,00</li> <li>76,00</li> </ul>
3	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBP/SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Kinerja Anggaran</li> <li>Perentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar</li> <li>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</li> <li>Perentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu</li> <li>Perentase Satuan Kerja yang mempunyai RKBMN sesuai standar dan tepat waktu</li> <li>Indeks Profesionalisme ASN</li> <li>Perentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengalihan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan</li> <li>Perentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspirasi</li> <li>Perentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses</li> <li>Perentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi</li> <li>Perentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online</li> <li>Nilai Akreditasi Perpustakaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>90,00</li> <li>75,00</li> <li>94,25</li> <li>80,85</li> <li>100,00</li> <li>77,10</li> <li>100,00</li> <li>3,00</li> <li>15,00</li> <li>5,00</li> <li>15,00</li> <li>C</li> </ul>

